



VOLUME XI / NO. 108 / SEPTEMBER 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



TAK PERLU SANGSI IKUT AMNESTI

Presiden Jokowi turun langsung dalam sosialisasi Amnesti Pajak.
Wujud keseriusan ajakan ungkap, tebus, lega. Waktunya membangun negeri dengan uang kita sendiri.

Daftar Isi



Foto Cover Anas Nur Huda	5 DARI LAPANGAN BANTENG
	6 EKSPOSUR
	10 LINTAS PERISTIWA
Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pengarah: Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadyanto. Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. Pemimpin Redaksi: Moh. Firdaus Rumbia. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulisty, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Muhammad Hijrah, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando. Tim Redaksi: Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Dovan Wida Perwira, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. Redaktur Foto: Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: mediakeuangan@kemenkeu.go.id.	
Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.	

LAPORAN UTAMA
13 Membangun Negeri dengan Uang Kita Sendiri
16 Infografis
18 Amnesti untuk Negeri
21 Kembali Untuk Indonesia
23 Tak Ada yang Perlu Ditakutkan
REPORTASE
25 Indonesia Sukses Selenggarakan WIEF ke-12
26 Menkeu Buka Masa Penawaran Sukuk Tabungan Seri ST-001

WAWANCARA
27 Bambang Brodjonegoro, Akademisi yang Menjadi Menteri

POTRET KANTOR
30 Pengawasan Internal Untuk DJP Lebih Baik

FIGUR
32 Pulang Kampung
EKONOMI TERKINI
36 Belanja Dipangkas Demi Anggaran Berkualitas
KOLOM EKONOM
40 Beras: Dulu, Sekarang, dan Yang Akan Datang
GENERASI EMAS
44 Cinta Ataka pada Dunia Robotika

OPINI
46 Mitigasi Risiko Amnesti Pajak
REGULASI
48 Ragam Investasi untuk Menampung Dana Repatriasi
INSPIRASI
50 Kisah Peneliti Pecinta Kopi

RENUNGAN
52 Prioritas, Waktu, dan Masa Depan

BUKU
53 Memilih untuk Menang

JALAN-JALAN
54 Tetirah ke Danau Linow

SELEBRITI
56 Tidak Usah Takut

57 BUNG PISKAL

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.





SEMUA PERTANYAAN ANDA
MENGENAI TAX AMNESTY

ada di

[HTTP://WWW.PAJAK.GO.ID/CONTENT/AMNESTI-PAJAK](http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak)

Dari Lapangan Banteng

Mari Membangun Negeri Sendiri

Antusiasme masyarakat terhadap program amnesti pajak sangat tinggi. Pada sosialisasi amnesti pajak di Hall D JIEXPO Kemayoran awal Agustus lalu, sebanyak 10.000 kursi terisi penuh. Selain itu, sosialisasi di Medan juga dihadiri sebanyak 3.500 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tak ingin melewatkan program amnesti pajak yang dicanangkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi pun mendukung penuh kebijakan amnesti pajak. Terbukti dengan terjun langsungnya presiden pada sosialisasi amnesti pajak di Kemayoran (Jakarta), Medan, Surabaya, Bandung, dan Semarang.

Program amnesti pajak ini merupakan program sekali untuk selamanya. Apabila dana repatriasi masuk ke negeri ini, maka dana tersebut bisa menghasilkan investasi baru.

Dengan adanya investasi baru, maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal ini menciptakan tenaga kerja baru, serta akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebanyak 55 *gateway* telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menampung dana repatriasi. Beberapa lembaga diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan instrumen investasi. Diantaranya industri perbankan, manajer investasi, dan perantara perdagangan efek (*broker*). Dengan beragam instrumen tersebut, sektor keuangan dalam negeri menjadi mampu menampung dana-dana hasil amnesti pajak dan repatriasi.

Dengan kesiapan dari lembaga-lembaga tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memperkuat kesiapannya. Para petugas di lapangan telah dibekali dengan *tax knowledge base*. Selanjutnya, bimbingan teknis juga rutin dilakukan. Pelayanan juga tidak hanya di Kantor

Pelayanan Pajak dan tempat tertentu, mulai 1 September 2016 seluruh Kantor Wilayah bisa melayani penerimaan internasional.

Karena data Wajib Pajak (WP) tidak boleh bocor, maka kerahasiaannya dijamin dengan Undang-Undang. Bahkan saat mengikuti amnesti pajak, surat pernyataan WP menggunakan *barcode*. Tanda terimanya pun menggunakan *barcode*. Jadi nama pemilik data dan surat pernyataan itu tidak dapat diketahui. Dari segi teknologi informasi, sistem DJP aman.

Adanya kesiapan berbagai pihak, diharapkan semua elemen masyarakat ikut dan menyukseskan Amnesti Pajak ini. Kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya. Tidak perlu takut, masyarakat yang ikut Amnesti Pajak tidak akan terkena pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@KemenkeuRI**

Sudah kenal dengan #AmnestiPajak kan? Yuk, bagikan pendapat atau harapan kamu tentang Amnesti Pajak.

**RIZKY NUR ADAM
@RIZKYNURADAM1**

Smg dgn Adanya #AmnestiPajak Bisa meningkatkan minat investasi, dan menciptakan lapangan kerja Baru #kuis#OpiniAnda

**hamdanul
@hamdanul**

#AmnestiPajak jd sarana tumbuhn rasa memiliki RI dan sadar utk membangun brsama2, #OpiniAnda

**Dewi Herlina
@Dewi_Herlinaaa**

Harapan sy smoga dgn adanya #AmnestiPajak dan dana repatriasi di pasar keuangan bs mpercepat pembangunan infrastruktur #OpiniAnda

tweet



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri



Saat Bu Menteri Kembali

Foto
Agus Tri

Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati kembali masuk kabinet setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan, Rabu (27/7). Serah terima jabatan dari Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, dilakukan pada hari yang sama di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kementerian Keuangan di Jakarta.



Sabtu Berbeda di Jurangmangu

Foto
Andi Al Hakim

Tak seperti biasanya, Gedung Student Center Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Jurangmangu, dipenuhi ratusan anak muda yang hadir dalam Ministry Goes to Campus 2016 pada Sabtu (23/7). Acara bertema “Shape Your Future” itu dikemas dalam bentuk pameran dan seminar. Berbagai informasi terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disampaikan dengan atraktif.





27/07

Menteri Keuangan yang Pulang Kampung

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama Menteri-Menteri baru yang akan bergabung dalam Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (27/07). Dalam daftar tersebut, Kementerian Keuangan termasuk salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami pergantian Menteri. Menteri Keuangan baru yang akan menjabat adalah Sri Mulyani Indrawati, yang pada periode 2005-2010 pernah menjabat posisi yang sama. Sementara itu, Menteri Bambang Brodjonegoro bertugas sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).



29/07

Kembali Raih Penghargaan Pengelola Website JDIH Terbaik

Tahun ini, Kementerian Keuangan selaku anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kembali menerima penghargaan sebagai pengelola website JDIH terbaik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM kepada Kepala Biro Hukum Rina Widiyani Wahyuningdyah, yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Penyerahan penghargaan telah dilakukan di sela acara *Launching* Integrasi Nasional Database JDIH pada 27-29 Juli 2016 di Bandung.

29/07

Teks
BPPK

Foto
BPPK

BPPK dan UNDIP Tandatangani MoU Edukasi Keuangan Negara

Badan Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Universitas Diponegoro (UNDIP). Dalam waktu dekat, salah satu realisasi MoU ini adalah pemberian materi keuangan negara dalam mata kuliah yang ada di UNDIP, dimana narasumbernya berasal dari seluruh unit eselon I Kemenkeu. Saat acara penandatanganan yang berlangsung di Gedung Rektorat UNDIP pada Jumat (29/07), Kepala BPPK Sumiati memberikan apresiasi kepada UNDIP atas kerja sama edukasi keuangan negara. Ia berharap kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat tercipta sinergi antara akademisi dan praktisi.



01/08

Presiden Ingatkan Masyarakat Untuk Ikut Amnesti Pajak

Teks
DJBC

Foto
DJBC

Sosialisasi amnesti pajak kembali digelar. Kali ini acara sosialisasi dilakukan di JIEXPO Kemayoran pada senin (01/08) merupakan kerjasama antara Kementerian Keuangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Presiden Jokowi menyampaikan paparannya tentang kondisi ekonomi Indonesia yang tidak lepas dari kondisi global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Keberadaan amnesti pajak ini memberikan kepastian hukum dan merupakan suatu upaya agar dana yang di luar negeri dapat kembali ke Indonesia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa peluang untuk berinvestasi di Indonesia lebih baik dan menjanjikan.



11/08

Sosialisasikan Amnesti Pajak kepada Humas Pemerintah

Teks
DJBC

Foto
DJBC

Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) memiliki peran strategis untuk menyukseskan program amnesti pajak. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto pada acara sosialisasi Amnesti Pajak yang diselenggarakan oleh Bakohumas Kemenkeu, Kamis (11/08) di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta. "Peran Bakohumas sangat strategis, diharapkan kebijakan ini dapat disampaikan melalui saluran-saluran komunikasi yang terdapat di Kementerian/Lembaga, sehingga dapat meningkatkan *awareness* pegawai akan program amnesti pajak," jelasnya.

Agenda	
1-2/09	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menko-Menko mengenai Pembahasan RKA K/L 2017
2/09	Sosialisasi Umum PEMDA Sulsel di Universitas Brawijaya Malang
5-7/09	Rapat Panca Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit & Pembiayaan RUU APBN 2017 mengenai Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit & Pembiayaan RUU APBN 2017
8/09	Rapat Internal Badan Anggaran mengenai Persiapan Raker tentang Postur Sementara Hasil Asumsi Dasar, Pendapatan, dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2017
8/09	<i>Executive Training Strategic Analysis and Decision Making</i> di Darden School of Business, Charlottesville Virginia, US
9/09	SUN Goes To campuss di Makassar
13-14/09	Menjadi tuan rumah <i>Workshop Global Initiative Fiscal Transparency</i> di Jakarta
13-15/09	Penandatanganan MoU dengan Hongkong Customs di Hongkong
28/09	Menteri Keuangan menjadi <i>Speaker 71st National Electricity Day 2016</i> di Cendrawasih room, JCC
29/09	Launching ORI seri ORI012



11/08

Bea Cukai - Polri Gagal Penyelundupan 3,8 Kg Sabu

Teks
DJBC

Foto
DJBC

Bea Cukai dan Polri kembali melakukan operasi bersama terkait dengan penindakan di bidang narkoba. Kali ini tim gabungan dari Bea Cukai Tanjung Priok dan Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan 3,8 kg Methamphetamine (sabu) yang berasal dari Tiongkok dalam importasi melalui Pelabuhan Tanjung Priok. “Dari hasil analisis intelijen, kami dapati satu partai importasi Less than Container Load (LCL) yang dilakukan oleh perorangan berinisial JMT. Barang impor tersebut berupa 97 buah lady hand bag (tas wanita) dengan negara asal Tiongkok. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan menyelundupkan 76 bungkus sabu di dalam 38 buah tas,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Fadjar Donny Tjahjadi dalam acara Konferensi Pers Operasi Bersama Bea Cukai – Polda Metro Jaya di Aula Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Kamis (11/08).



15/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Gaungkan Amnesti Pajak, DJP Turun ke Jalan

Berbagai cara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggaungkan program amnesti pajak kepada segenap lapisan masyarakat. Tak terhitung sosialisasi, *talkshow*, pemasangan spanduk dan penayangan iklan yang telah dilakukan. Untuk menyebarkan dan menggaungkan program amnesti pajak, KPP Pratama Jakarta Palmerah melakukan terobosan dengan membagikan *leaflet* kepada pengendara kendaraan bermotor yang melintas di Perempatan Tomang dan sekitarnya pada Senin (15/08). Menurut koordinator kegiatan ini, Ruswandi, aksi turun ke jalan dipilih karena KPP Pratama Jakarta Palmerah berada di lokasi yang sangat strategis dan setiap hari dilintasi oleh ribuan pengendara kendaraan bermotor.

17/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Bea dan Cukai Merauke Awasi Perbatasan Sota

Pada 17 Agustus 2016, Bea Cukai Merauke lakukan pengawasan ekstra di perbatasan Sota terkait dengan kegiatan *Wonderful Indonesia Cross Border HUT RI ke 71*. Dalam pengawas tersebut, Bea Cukai bekerjasama dengan Imigrasi dan Karantina setempat atau biasa disebut Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ). Tim CIQ berkoordinasi dan melakukan kegiatan pelayanan serta operasi bersama yang dimulai dari tanggal 15 Agustus - 17 Agustus 2016. Saat dilakukan pemeriksaan kepada para pelintas batas, terdapat tegahan atas barang bawaan diantaranya 57 dada kura-kura, 14 lembar gelembung, 5 pasang tanduk rusa dan beberapa barang tegahan lainnya. Semua barang diserahkan dan ditahan oleh tim dari karantina dan dikembalikan lagi setelah acara selesai pada 19 agustus 2016.



Laporan Utama



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau kesiapan petugas *Call Center* Posko Amnesti Pajak dalam melayani pertanyaan masyarakat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (15/8).

Foto
Agus Tri

Membangun Negeri dengan Uang Kita Sendiri

“Bapak dan Ibu sekalian yang membawa pulang uangnya ke Indonesia memiliki peran luar biasa penting untuk membangun pondasi ekonomi agar lebih stabil dan mampu membiayai pembangunan dengan sumber dana sendiri,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sosialisasi amnesti pajak di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Senin (1/8). Pernyataan Menkeu tersebut disambut dengan tepuk tangan panjang dari sekitar 10 ribu pengusaha yang memadati

lokasi acara. Tak hanya di Jakarta, sosialisasi amnesti pajak yang digelar Kementerian Keuangan di sejumlah kota besar lainnya juga dipadati ribuan peserta, antara lain di Surabaya, Medan, Semarang, dan Bandung. Sosialisasi amnesti pajak bukan hanya diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, melainkan juga beberapa instansi lain, seperti perbankan dan asosiasi pengusaha. Presiden Jokowi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyukseskan kebijakan amnesti pajak dengan terjun langsung pada berbagai kesempatan sosialisasi. Presiden, yang senantiasa disambut

meriah oleh masyarakat tersebut, meyakinkan bahwa kebijakan amnesti pajak semata-mata diluncurkan untuk kepentingan bangsa. Menurutnya, situasi ekonomi global telah mempengaruhi penurunan pertumbuhan di berbagai negara. Akibatnya, berbagai negara saat ini, termasuk Indonesia, berlomba-lomba mencari uang masuk untuk menggerakkan perekonomian. “Kita juga punya uang banyak, tapi ada yang ditaruh di luar (negeri), di bawah kasur, di bawah bantal. Kenapa kita harus berebut dengan negara lain, padahal kita punya uang sendiri?” kata Presiden yang disambut tepuk tangan para peserta sosialisasi.

Lebih jauh, Presiden mengungkapkan kebijakan amnesti pajak merupakan momentum untuk membangun negeri dengan uang kita sendiri. “Kita hidup, makan, dan bertempat tinggal di Indonesia. Mengapa uang-uang itu harus ditaruh di luar negeri?” ujar Presiden. Pemerintah pun telah siap dengan berbagai instrumen investasi untuk menampung dana dari kebijakan ini, antara lain dalam bentuk Surat Berharga Negara, Surat Utang Negara, Sukuk, dan saham di bursa efek dan BUMN. Presiden menjamin investasi yang disiapkan pemerintah cukup menguntungkan. “*Return*-nya juga lumayan besar dibandingkan dengan investasi di luar negeri,” kata Presiden. Sementara pada jangka menengah, dana tebusan

dan repatriasi aset bisa digunakan untuk membangun berbagai sarana infrastruktur.

Dalam berbagai kesempatan sosialisasi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa seluruh pajak terutang, termasuk di dalamnya sanksi administratif dan pidana pajak sebelum 31 Desember 2015 dapat dihapuskan dengan mengikuti kebijakan amnesti pajak. Setiap orang atau badan berhak mendapatkan amnesti pajak, yaitu meliputi badan, orang pribadi, pengusaha omset tertentu, dan bahkan orang pribadi dan badan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (WP). Namun, pengecualian amnesti pajak berlaku untuk WP tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Amnesti Pajak. Pengecualian tersebut ditujukan untuk wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, wajib pajak dalam proses peradilan, dan wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Menkeu juga menegaskan bahwa sikap patuh pajak merupakan wujud sikap cinta terhadap negeri. “Bayarlah pajak karena itu bentuk kecintaan yang nyata pada republik,” lanjutnya.

Menurut Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, Daniel Martin Siyaranamual, kehadiran Presiden

Jokowi dalam berbagai sosialisasi memberikan sinyal kepada wajib pajak bahwa pemerintah serius dalam penerapan kebijakan amnesti pajak. “Mungkin lebih serius dibandingkan dengan kebijakan *sunset policy* pada 2008 lalu,” kata Daniel yang dalam wawancara dengan Media Keuangan, Selasa (9/8) di Bandung. Daniel memberikan catatan bahwa turun langsungnya Presiden pada proses sosialisasi tidaklah cukup tanpa ada peningkatan kemampuan penegakan hukum dari otoritas pajak. “Justru kemampuan penegakan hukum dari otoritas pajak bagi para wajib pajak yang melakukan pelanggaran adalah salah satu komponen terpenting untuk keberhasilan dari kebijakan amnesti pajak,” lanjutnya.

Ungkap, tebus, lega

Dalam setiap kesempatan sosialisasi, Menkeu selalu mengajak para wajib pajak untuk tidak ragu mengikuti program yang memiliki slogan *Ungkap, Tebus, Lega* itu. Yang dapat diungkapkan oleh peserta amnesti pajak adalah keseluruhan harta yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh sampai dengan 31 Desember 2015.

Pengungkapan harta untuk mengikuti amnesti pajak diberikan dengan tarif berbeda sesuai waktu dan lokasi. Jika harta diungkapkan di dalam negeri, maka tarif yang berlaku pada periode I adalah sebesar dua persen sejak UU Amnesti Pajak berlaku hingga akhir bulan ketiga. Tarif empat persen diberikan untuk periode II yaitu mulai bulan keempat sejak UU berlaku hingga 31 Desember 2016 dan pada periode III dikenakan tarif enam persen, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Maret 2017. Tarif berbeda dikenakan untuk pengungkapan harta yang berada di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke luar negeri. Tarif yang berlaku yaitu empat persen pada periode I, enam persen pada periode II, dan sepuluh persen pada periode III. Namun, jika peserta bermaksud mengalihkan harta di luar ke dalam negeri, maka tarif dalam negeri yang akan dikenakan.

Kebijakan amnesti pajak juga memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM turut

berpartisipasi. Dalam hal ini, pemerintah mengenakan tarif khusus omzet tertentu. Wajib pajak dengan peredaran usaha hingga Rp4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dapat menikmati tarif setengah persen jika harta yang diungkapkan lebih dari Rp10 miliar dan dua persen jika harta yang diungkapkan lebih dari Rp10 miliar sejak UU berlaku hingga 31 Maret 2017.

Animo

Menurut Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, Nury Effendi, antusiasme masyarakat terhadap program amnesti pajak dapat dimengerti. Secara teori, arus modal akan banyak masuk pada tempat yang memiliki tingkat pengembalian paling tinggi. “*Return* itu tidak harus bermakna uang. Kadang-kadang pemilik modal akan menimbang antara *return and risk*. Amnesti pajak secara dramatis mengurangi risiko (investasi),” kata Nury.

Di samping itu, menaruh modal di Indonesia saat ini merupakan waktu yang tepat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. “Indonesia *looks promising* sekarang ini,” kata Nury. Dalam sudut pandang pengamat, dia berharap pemerintah dapat mengawal agar dana yang masuk dari kebijakan amnesti pajak dapat mendorong pertumbuhan di sektor

riil. “Efek jangka panjangnya akan lebih terasa terhadap ekonomi jika dana yang masuk ke pasar uang dan pasar modal bisa tembus ke sektor riil,” ujar Nury menambahkan.

Hera Susanti dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyatakan bahwa dalam perjalanan tax amnesty di awal awal ini akan banyak yang masih bersikap menunggu. Mereka masih mencari informasi dan kepastian tentang implikasi pelaporan hartanya. “Saya yakin trend akan meningkat, mungkin menjelang akhir September akan lebih banyak harta repatriasi yang dilaporkan.” ujarnya. Hampir senada dengan hal diatas Chandra Fajri Ananda dari Universitas Brawijaya menyatakan bahwa secara umum para wajib pajak masih *wait and see*, termasuk tentang jaminan keamanan atas informasi yang diberikan.

Sementara itu, Devi Valeriani, Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung memberikan masukan agar pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan-kebijakan lain di luar program amnesti demi tercapainya target perpajakan. Sejumlah kebijakan yang dapat ditempuh misalnya meningkatkan kuantitas dan kualitas *audit tax*, melakukan pendataan terkini dan detail jumlah wajib pajak melalui Sensus Pajak Nasional, dan meningkatkan sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan *law enforcement* di

bidang perpajakan. “Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak,” kata Devi.

Dukungan pelaku usaha

Kebijakan amnesti pajak mendapatkan dukungan luas, termasuk dari para pelaku usaha. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo Jawa Barat, Dedi Wijaya, dalam sosialisasi di Bandung mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap pajak merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab warga negara. “Membayar pajak merupakan praktek bela negara dan cinta tanah air,” kata Dedi.

Di hadapan ribuan pengusaha, Dedi mengapresiasi usaha pemerintah memperjuangkan UU Pengampunan Pajak hingga berhasil disahkan bersama DPR pada akhir Juni. “Amnesti pajak merupakan tinta emas dalam ekonomi dan pembangunan karakter bangsa,” ujarnya. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pengusaha untuk tidak menunda lagi mengikuti program ini.

Dukungan terhadap program amnesti pajak juga datang dari Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roslani. Seperti halnya Apindo, Kadin juga menyelenggarakan rangkaian sosialisasi, baik untuk anggotanya maupun masyarakat luas, di sejumlah kota. “Kami menyambut positif kebijakan amnesti pajak. *Insya Allah* kebijakan ini bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pemerintah,” kata Rosan kepada Media Keuangan akhir bulan lalu di Jakarta.

Rosan mengimbau para pengusaha untuk bersama-sama membangun negeri dengan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak. Dia berharap para pengusaha dapat memanfaatkan momentum diberlakukannya kebijakan amnesti pajak yang hanya sekali saja. “Ayo kita sama-sama membawa dana ke sini (dalam, negeri), karena *kan* tidak bisa juga pemerintah memaksa,” ujar Rosan. Di samping itu, pengusaha yang belum lama dilantik menjadi Ketua Kadin itu juga menambahkan bahawa kebijakan amnesti pajak perlu mendapatkan dukungan karena menjadi pintu pembuka berlangsungnya proses reformasi perpajakan.

Ikut Amnesti Pajak, Ikut Bangun Negara

Era berlakunya Automatic Exchange of Information (AEI) sudah di depan mata. Kemudahan pertukaran informasi saat itu membuat para wajib pajak (WP) tidak bisa lagi menghindar dari kewajiban pajaknya. Dengan demikian, berbagai fasilitas yang ditawarkan pemerintah dalam Program Amnesti Pajak sudah selayaknya diambil oleh para WP. Terlebih kepada mereka yang ingin ikut serta dalam membangun negara. Keberhasilan program ini tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang, tetapi juga mampu memperkuat fiskal dan perekonomian negara demi tercapainya pembangunan Indonesia.

Apa itu Amnesti pajak?

program pengampunan yang diberikan Pemerintah kepada WP yang meliputi:

- penghapusan pajak terutang;
- penghapusan sanksi administrasi perpajakan;
- penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT.

Siapa yang berhak?

Semua WP, kecuali:

- WP yang masih dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
- WP dalam proses peradilan terkait tindak pidana bidang perpajakan;
- WP yang menjalani hukuman pidana terkait tindak pidana bidang perpajakan;

Bagaimana Caranya?

Ungkapkan harta, bayar uang tebusan



Apakah Uang Tebusan itu?

Uang tebusan = tarif tebusan x nilai harta bersih

Berapa Nilai Harta Bersih?

Harta (-) Utang

Berapa Tarif tebusan?

Repatriasi/deklarasi dalam negeri

2%

berlaku 1 Juli s.d 30 September 2016

3%

berlaku 1 Oktober-31 Desember 2016

5%

berlaku 1 Januari-31 Maret 2017

Deklarasi luar negeri

4%

berlaku 1 Juli s.d 30 September 2016

6%

berlaku 1 Oktober-31 Desember 2016

10%

berlaku 1 Januari-31 Maret 2017

UMKM

0,5%

dengan nilai deklarasi s.d. 10 M

2%

dengan nilai deklarasi > 10 M

Apa saja Fasilitas Pengampunan Pajak?

- Penghapusan pajak terutang dan sanksinya
- Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Penghentian

Langkah Memperoleh Amnesti Pajak



1 Datang Ke KPP atau tempat yang ditentukan

Catat informasi lengkap mengenai syarat, dokumen kelengkapan, dan cara pengisian Surat Pernyataan Harta-SPH.



2

Hitung dan lunasi uang tebusan

Pelunasan melalui bank persepsi yang ditetapkan dengan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 513.



4

Ajukan SPH beserta dokumen pelengkap ke KPP

3

Siapkan SPH dan kelengkapan dokumen

Dokumen meliputi bukti pembayaran uang tebusan, bukti pelunasan uang tunggakan pajak (jika ada), daftar rincian harta, daftar utang serta dokumen pendukung, bukti pelunasan pajak yang tidak/kurang dibayar atau pajak yang tidak seharusnya dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan, fotokopi SPT PPh terakhir, dan beberapa surat pernyataan.

5

Terima Surat Keterangan Pengampunan Pajak

dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung mulai tanda terima diperoleh

sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Amnesti untuk Negeri



Amnesti sudah disahkan. Instrumen keuangan telah disiapkan. Proyek pembangunan tengah menunggu antrian pendanaan. Kini, saatnya masyarakat berperan.

Presiden Joko Widodo di JIEXPO.

Foto Anas Nur Huda

Gambar origami burung terbang berwarna kuning keemasan tampak kontras dengan latar biru tua pada sebuah *billboard* yang terdapat di dalam kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Kata-kata ‘ungkap, tebus, lega’ yang tertulis ditengahnya menjadi *tagline* seolah terukir di sanubari sejak akhir Juli.

Bagaimana tidak, kampanye amnesti pajak yang digaungkan pemerintah mulai membahana ke seluruh pelosok nusantara dalam beragam media. Demi negeri, program ini dinilai mampu membantu mendanai pembangunan infrastruktur yang tengah menjadi fokus pemerintah saat ini.

Dalam Pencanangan Program Pengampunan Pajak di JIExpo, Jakarta, Senin (1/8), Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa amnesti pajak bermanfaat bagi kepentingan bersama. “Tujuannya sangat jelas bahwa pemerintah ingin agar *tax amnesty* ini bermanfaat nyata bagi kepentingan bangsa, bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Ini hanya untuk satu, pembangunan negara dan bangsa, tidak ada yang lain,” tegasnya seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Presiden juga mengimbau seluruh masyarakat agar turut berpartisipasi dan mengawasi jalannya program amnesti pajak. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran atau tindak kecurangan dari pihak tak bertanggung jawab, Presiden meminta masyarakat untuk segera melaporkannya melalui *hotline* 0811-2283333.

Joko Widodo menjelaskan bahwa program ini bukan upaya pengampunan bagi para koruptor atau pemutihan atas aksi pencucian uang. Ia justru menegaskan bahwa pemerintah hanya menysasar para pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara-negara *tax heaven* untuk membawa kembali kekayaannya ke tanah air.

Mendukung arahan Presiden, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan bahkan melakukan upaya ‘*jemput bola*’ dengan sosialisasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Sosialisasi ini dilakukan disela-sela acara Indonesia *Business Outlook* yang diselenggarakan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) di Ritz Carlton Milenia Singapura, Kamis (11/08).

Saat itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menghimbau WNI agar memanfaatkan program amnesti pajak sebelum batas akhir 31 Maret 2017. Tak tanggung-tanggung, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura telah menyediakan berbagai kemudahan bagi wajib pajak. Fasilitas tersebut

diantaranya seperti layanan *e-registration* untuk memperoleh NPWP, *e-filing* untuk pelaporan SPT, serta penerimaan surat pernyataan dan konsultasi amnesti pajak.

Harga mati

Perlahan tapi pasti. *Dashboard* statistik amnesti pajak pada laman pajak.go.id menunjukkan peningkatan signifikan sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ditetapkan. Ini bukti bahwa wajib pajak berbondong-bondong mendeklarasikan hartanya. Ini juga bukti bahwa pemerintah khususnya Kementerian Keuangan beserta beberapa lembaga dan sektor swasta terkait serius mempersiapkan program yang diperkirakan akan mengantongi dana sebesar Rp165 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi di bawah Kementerian Keuangan yang memegang andil dalam program ini telah menyiapkan seluruh jajarannya untuk melakukan sosialisasi, memproses deklarasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady menyatakan bahwa sampai sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. “Kendalanya tidak ada. Mereka masih menghitung berapa hartanya, berapa duitnya, kalau (dana) masuk ke Indonesia untuk investasi apa. Mereka masih berpikir, (masih) butuh waktu,” katanya.

Selain gencar melakukan sosialisasi, tambah Ken, pihaknya menyiapkan beberapa layanan informasi. Pertama, *Tax Amnesty service* 1500745 yang menangani pertanyaan *tax knowledge base*. Kedua, *helpdesk* amnesti pajak yang tersebar pada 588 *point of services* di seluruh tanah air dan sejumlah negara. Ketiga, *website* dan sosial media yang menyediakan informasi amnesti pajak.

Disamping itu, DJP juga membina kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyebarluaskan informasi amnesti pajak. Masyarakat juga dapat memantau berapa total dana hasil amnesti pajak dan deklarasi harta secara *real time* dalam data statistik amnesti pajak yang dapat diakses melalui *website* pajak.go.id.

Ken juga menyiapkan aplikasi pengiriman pesan instan resmi yang memungkinkan para wajib pajak mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. “Bahkan saya punya WA (*WhatsApp*) resmi 0813-10503747. Saya sendiri yang jawab. Saya buka sampai jam 4 pagi. Mungkin yang perlu digaris bawahi kenapa kita melakukan ini, kami sudah habis-habisan untuk amnesti pajak. Amnesti harga mati,” ungkapnya.

Dukungan OJK

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad menyatakan kesiapan jajarannya untuk mensukseskan amnesti pajak. Dikatakan Muliaman bahwa OJK berperan dalam melakukan pengawasan terhadap instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan. “Peran OJK lebih banyak pada persiapan menerima dana repatriasi. Repatriasi ini kita harapkan bisa memperbaiki, bisa memperdalam industri keuangan nasional. Dana yang masuk bisa kita gunakan untuk keperluan yang lebih produktif, membangun infrastruktur, dan sebagainya,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk menampung dana tersebut, hingga pertengahan Agustus, pemerintah telah menunjuk 55 *gateway* yang terdiri atas 18 industri perbankan, 18 manajer investasi, dan 19 perantara perdagangan efek (broker). Muliaman menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta lembaga tersebut untuk menyiapkan instrumen investasi.

Bentuk instrumen investasi atas dana yang dialihkan diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016. Dalam peraturan tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan terdapat sedikitnya delapan bentuk instrumen investasi.

Adapun bentuk instrumennya yaitu Surat Berharga Negara, obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, dan obligasi pada perusahaan swasta. Selain itu, bentuk instrumen lainnya berupa

investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas serta bentuk investasi lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan beragam instrumen itu, Muliaman yakin bahwa sektor keuangan dalam negeri mampu menampung dana-dana hasil amnesti pajak dan repatriasi. Meskipun demikian, Muliaman menuturkan bahwa pemerintah kini menghadapi tantangan terbesar yakni bagaimana upaya mengalokasikan dana tersebut agar dana yang ditampung tidak didiamkan, melainkan diinvestasikan untuk pembangunan.

“Prinsipnya harga mati, tidak boleh ada istilah gagal. Yang penting bagaimana kita mampu memobilisasi dana repatriasi seoptimal mungkin. Yang penting uang masuk ke sektor keuangan bisa masuk sektor riil. Kita tanamkan di Indonesia minimal tiga tahun atau lebih. Kita alokasikan untuk keperluan yang lebih produktif. Mudah-mudahan semakin banyak pesertanya semakin bagus,” tuturnya.

Muliaman mengapresiasi Kementerian Keuangan yang berperan sentral dalam program amnesti pajak. Pihaknya, kata Muliaman, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah hal. Pertama, menyiapkan *gateway*. Kedua, menyiapkan produk-produk keuangan sebagai instrumen investasi. Ketiga, memberikan fleksibilitas bagi ketika dana repatriasi sudah masuk ke Indonesia.

“Peran Kementerian Keuangan ada di garis depan. Kita dukung dengan pengembangan infrastruktur industri keuangan yang lebih

konduusif sehingga terutama repatriasi yang masuk betul-betul bisa masuk ke sektor ekonomi yang produktif, menggerakkan roda ekonomi yang lebih lanjut,” katanya.

Oleh karena itu, Muliaman menyatakan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berpartisipasi dalam amnesti pajak. Ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Mau taruh uang dimana dengan *return* yang tinggi, semuanya (negara) sedang turun (ekonomi) begini. Investasi ya di Indonesia. *Return*-nya baik kemudian ada program *tax amnesty*. *Timing*-nya pas karena pada saat yang sama pemerintah punya list panjang proyek yang perlu pembiayaan,” tuturnya.

Kesiapan perbankan

Semangat optimis yang sama juga terasa oleh Direktur Bank Negara Indonesia, Achmad Baiquni. Ia melihat kebijakan amnesti pajak berada di momentum yang tepat. Dalam waktu dekat, katanya, era keterbukaan informasi secara global akan berlaku sehingga kerahasiaan data nasabah akan dibuka. Ditambah lagi dengan program amnesti pajak dengan tarif tebusan yang sangat rendah, ini menjadi insentif sendiri bagi para wajib pajak.

Sebagai salah satu bank yang telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menampung dana amnesti pajak, Baiquni optimis dapat menampung dana repatriasi yang tidak sedikit jumlahnya. “Kalau saya menargetkan paling tidak sekitar 60-70 triliun dari dana repatriasi karena kita menghitung jumlah WP yang tergolong dari nasabah besar, menengah, dan kecil. Kita perkirakan satu nasabah ini akan membawa masuk uangnya sekian, ini hitung-hitungan kita,” ungkapnya.

Baiquni menekankan pentingnya pemerintah menciptakan produk atau proyek investasi yang membuat wajib pajak tertarik untuk menginvestasikan hartanya di Indonesia. Ia yakin masih cukup banyak proyek infrastruktur maupun non-infrastruktur yang membutuhkan pendanaan.

Terakhir, Baiquni berharap agar program amnesti pajak sukses karena manfaatnya dapat menambah penerimaan negara yang diperlukan untuk belanja barang modal, sehingga meningkatkan kapasitas produksi. “Kalau kapasitas produksi meningkat, diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin tahun semakin bergulir.”

Teks lin Kurniati

Laporan Utama



Helpdesk
Amnesti
Pajak.

Foto
Anas Nur
Huda

Kembali Untuk Indonesia

Amnesti pajak, sejatinya merupakan ajakan membangun negeri. Semangat kebangsaan kini tak lagi dimaknai memperjuangkan kemerdekaan dengan bambu runcing. Kerelaan membayar pajak juga menjadi wujud partisipasi dalam membangun tanah air.

Pandangan Pengusaha

Sofjan Wanandi, Staf Khusus Wakil Presiden yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, amnesti pajak sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh banyak Wajib Pajak (WP) besar. Apalagi sejak krisis tahun 98 muncul banyak dugaan yang mengatakan bahwa mereka memindahkan dananya ke luar negeri. Selain itu, pada 2018 ketentuan keterbukaan informasi perbankan antarnegara akan mulai diberlakukan. Sistem ini akan menyinggung siapa saja yang memarkir asetnya di luar negeri. “Sekarang sudah waktunya para pengusaha mengembalikan uangnya untuk membantu ekonomi kita yang sedang sulit,” kata Sofjan.

Dijelaskan Sofjan lebih lanjut, amnesti pajak sebenarnya memberi banyak kelebihan. Apalagi ekonomi global masih lesu sehingga tidak banyak investasi di luar negeri yang menguntungkan. Sofjan mencontohkan, saat ini Jepang menerapkan suku bunga negatif. Artinya para investor justru harus membayar dana yang diutangkan. Sementara di Amerika dan Singapura bunga yang didapatkan hanya sekitar 1-2 persen. Indonesia sendiri masih memberikan bunga 4-5 persen untuk obligasi dollar dan 7-8 persen untuk obligasi rupiah. “Sekarang cari untung di Indonesia sajalah. Sebelum ada amnesti, Anda akan dikenakan pajak 30 persen. Tetapi sekarang Anda cukup bayar 2-4 persen. Kenapa *enggak* kita memanfaatkan itu?”, paparnya.

Sementara itu, terkait kekhawatiran akan penyelidikan pajak lebih lanjut, Sofjan menceritakan bahwa tanda-tanda tersebut tidak terlihat ketika Presiden mengundang para pengusaha dalam sosialisasi amnesti pajak. “Pengusaha itu kalau nggak ada untungnya mana mau datang. Nyatanya mereka mau mendengar pidato Presiden dan menanyakan langsung komitmen beliau. Jadi lebih baik deklarasikan saja dana ke dalam negeri sehingga sesudahnya kita

bisa hidup tenang” terang Sofjan.

Sofjan mengingatkan, konsolidasi perpajakan perlu cepat dilaksanakan. Peraturan turunan Undang-Undang Pengampunan Pajak harus segera dilengkapi agar petugas pajak maupun WP memiliki pegangan yang sama. Selain itu, aturan pelaksanaan harus benar-benar diterapkan agar timbul rasa saling percaya. “Kalau hukum ditegakkan dengan benar, amnesti pajak akan jalan dan kita *enggak* perlu lagi kucing-kucingan,”katanya.

Help Desk Amnesti Pajak

Untuk membantu masyarakat memahami amnesti pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka meja informasi (*help desk*) di 588 tempat. Titik penyebarannya berada di 33 Kantor Wilayah DJP, 341 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 1 kantor pusat DJP, dan 3 bank BUMN. DJP juga menyiapkan titik pelayanan pada 207 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta 3 titik pelayanan di KBRI Singapura, KBRI Inggris, dan Konsulat Jenderal RI di Hongkong.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menerangkan, *helpdesk* ini dibuka dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 waktu setempat. Di sini WP dapat meminta informasi awal seputar cara pengajuan permohonan amnesti pajak, termasuk cara menghitung uang tebusan.

WP kemudian dapat menghitung seluruh hartanya

sendiri (*self assessment*). “Petugas *help desk* akan menjelaskan tata cara pengisian formulir dan informasi utang pajak. Tetapi penyerahan Surat Pernyataan pembayaran uang tebusan akan dilakukan di loket khusus pada KPP tempat WP terdaftar agar data mereka terjaga kerahasiaannya,” paparnya.

Ditanya mengenai kesulitan yang dihadapi petugas *help desk*, Yoga menceritakan bahwa masalah perpajakan yang dibawa WP bisa sangat berbeda satu dengan lainnya. “Misalnya ada seorang ibu rumah tangga yang diceraikan oleh suami dan memiliki beberapa harta, tetapi yang bersangkutan tidak tahu apakah harta tersebut sudah dilaporkan mantan suaminya atau belum. Variasi kasusnya macam-macam tergantung kondisi masing-masing WP,” terang Yoga. Karakter WP yang beragam tersebut acap membuat petugas pajak membutuhkan waktu untuk menjawab dengan lugas, terlebih dengan data *asset* WP yang minim. Namun Yoga berjanji akan terus meningkatkan pengetahuan petugas *help desk* akan ragam contoh kasus pajak sehingga ke depannya para petugas akan lebih siap lagi.

Yoga berpesan agar seluruh petugas *help desk* memberikan layanan terbaik.”Dalam periode amnesti pajak ini kita *enggak* perlu hitung-hitungan waktu dan tenaga. Meski hari Sabtu kita harus bekerja, ayo kita kerja sama-sama untuk menyukseskan amnesti pajak,”tegasnya.

Teks Irma Kesuma



Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady.

Foto
lin Kurniati

Tak Ada yang Perlu Ditakutkan

Peserta sosialisasi Amnesti Pajak selalu membludak melebihi kuota. Antusiasme para Wajib Pajak memberikan sinyal positif yang menumbuhkan optimisme.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady tak pernah gentar dengan tanggapan publik yang mengkritisi diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Ia berpendirian, kebijakan Amnesti Pajak ini semata-mata untuk kepentingan nasional. amnesti pajak bertujuan untuk meningkatkan geliat investasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Pajak terkait perkembangan amnesti pajak.

Bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo saat Sosialisasi Amnesti Pajak?

Beliau terjun langsung saat Sosialisasi Amnesti Pajak di Kemayoran (Jakarta), Medan, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Beliau sangat fokus terhadap hal ini. Sosialisasi di Kemayoran dihadiri 10.000 peserta, di Medan dihadiri 3500 peserta, padahal undangannya 3000 peserta.

Pada dasarnya amnesti pajak ini tidak hanya untuk penerimaan negara ya. Fungsi amnesti pajak ada dua, *budgeter* dan *regulerend*. *Budgeter* berarti untuk penerimaan, *regulerend* berarti ada dana masuk atau dana yang dideklarasikan, baik dalam maupun luar negeri, yang bisa digunakan untuk investasi.

Kalau ada investasi baru intinya pertumbuhan ekonomi akan naik. Pertumbuhan ekonomi naik berarti bisa menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja yang

terserap akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah semuanya berputar kan. Dari situ nanti timbul objek dan subjek pajak baru, itu yang saya pentingkan. Jadi amnesti pajak bukan untuk penerimaan saat ini saja, tapi berefek juga ke depan.

Bagaimana sistem kerahasiaan dan keamanan data bagi para Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak?

Kerahasiaan data itu dijamin dengan Undang-Undang. Bahkan saat mereka (para Wajib Pajak) mengikuti amnesti pajak, surat pernyataannya menggunakan *barcode*. Tanda terimanya pun menggunakan *barcode*. Jadi kita tidak bisa melihat nama pemilik surat pernyataan itu. Dari segi teknologi informasi, sistem kita aman. Selama Indonesia merdeka, mana ada kasus SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) bocor, *nggak* ada kan.

Sejumlah kelompok masyarakat menggugat UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Bagaimana Anda memandang hal ini?

Oh kita sudah siap. Kita sudah membentuk tim khusus untuk menangani *judicial review*. Jadi kalau nanti disidang kita akan hadir, bu Menteri (Sri Mulyani) juga hadir. Hal ini tidak menjadi kendala yang berarti, *toh* amnesti pajak ini bukan untuk kepentingan DJP, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang perlu ditakutkan.

Bagaimana kesiapan tim di balik sosialisasi Amnesti Pajak?

Saya membuka nomor *handphone* saya bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi. Pernah suatu hari ada sekitar 1500-an pesan masuk melalui *Whatsapp* (sebuah layanan pesan singkat melalui jaringan internet). Dengan tingginya antusiasme para Wajib Pajak, saya minta juga semua Kepala Kantor Wilayah DJP untuk memberikan nomor *handphone*-nya untuk melayani berbagai pertanyaan yang masuk.

Kami juga menyiapkan empat nomor telepon pada satu posko khusus internal yang melayani pertanyaan-pertanyaan para wajib pajak. Nomor ini beda dengan 1500745 (*call center* Amnesti Pajak) yang kami siapkan

untuk eksternal. Para petugas di lapangan juga kami bekali dengan *Tax Knowledge Base* di portal. Semua pertanyaan tentang Amnesti Pajak bisa mereka jawab dari *Tax Knowledge Base*. Jadi harusnya semua jawaban di kantor manapun tentang amnesti pajak itu sama. Kami juga selalu memeperbarui informasi-informasi di *Tax Knowledge Base*.

Selanjutnya, bimbingan teknis juga rutin dilakukan. Minggu ini (minggu kedua Agustus) kita melakukan bimbingan teknis lagi. Awalnya pelayanan hanya di Kantor Pelayanan Pajak dan tempat tertentu, nah ini Menteri Keuangan sudah menentukan mulai 1 September 2016 seluruh Kantor Wilayah bisa melayani penerimaan internasional.

Kami juga mengikat media sosial dan meminta bantuan publikasi kementerian/lembaga untuk memborbardir masyarakat terkait informasi Amnesti Pajak. Saya juga menghubungi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk membantu semua acara publik diisi oleh amnesti pajak.

Apakah sektor keuangan kita kuat untuk menampung dana repatriasi yang masuk?

Kuat, buktinya cadangan devisa kita naik, kurs mata uang naik, indeks harga saham naik, semuanya naik.

Sampai kapan program sosialisasi Amnesti Pajak ini dilakukan?

Sosialisasi ini akan ada terus sampai akhir Maret 2016 (batas akhir periode program).

Apa harapan Anda terhadap implementasi Amnesti Pajak?

Diharapkan semua elemen masyarakat ikut dan menyukseskan amnesti pajak ini. Bagi yang tidak ikut, jangan salahkan jika kita audit (hartanya) di tahun berikutnya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Masyarakat yang ikut amnesti pajak tidak akan kami lihat lagi kesalahan yang sudah lalu (tidak akan dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap catatan pajak sebelumnya). Sekali untuk selamanya.

Teks Pradany Hayyu

Indonesia Sukses Selenggarakan WIEF ke-12

Indonesia menjadi tuan rumah *World Islamic Economic Forum* (WIEF) ke-12 yang diselenggarakan di *Jakarta Convention Centre* pada 2-4 Agustus lalu. Forum yang membahas promosi peran sistem ekonomi Islam dalam mendorong perekonomian global ini merupakan kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah, setelah sebelumnya berlangsung pada tahun 2009. Saat pembukaan acara Selasa (2/8), Presiden RI Joko Widodo menaruh harapan besar atas terselenggaranya acara ini. “Saya berharap, semoga forum ini dapat memberikan hasil yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat muslim di seluruh dunia,” ujar Presiden.

Menurutnya, di tengah situasi ekonomi global yang mengalami perlambatan, masyarakat muslim menghadapi beberapa tantangan seperti masalah pengangguran, teknologi dan juga perkembangan media sosial serta media massa yang sangat pesat. Untuk menjawab tantangan tersebut, masyarakat



muslim harus mempersiapkan diri dengan membangun fundamental yang kuat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi dari masyarakat berpenghasilan menengah yang besar, serta tenaga kerja berpendidikan. Ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain potensial dalam industri syariah, seperti bidang keuangan islam, industri halal serta *fashion* dan industri kreatif. “Ditambah dengan 50 persen penduduk berusia produktif, ini dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan yang berkesinambungan,” katanya.

Di sela-sela forum WIEF, berlangsung pula *Marketplace of Creative Arts Festival* atau *MOCAfest* sebagai bagian program jaringan pemimpin muda WIEF. *MOCAfest* bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung para talenta muda di sektor kreativitas seni, serta menjadi penghubung antara dunia seni dan bisnis.

Ketua WIFE, Tun Musa Hitam menyampaikan apresiasinya kepada

panitia, terutama dari Kementerian Keuangan yang dinilai sukses menyelenggarakan forum ini dengan baik. Selama tiga hari, tercatat sekitar 4.000 partisipan yang berasal dari 73 negara ikut serta dalam acara ini.

Sebagai informasi, WIEF ke-12 tahun ini membawa tema *Decentralising Growth, Empowering Future Business*. Beberapa tema kecil yang dibahas dalam forum ini antara lain pembiayaan infrastruktur, industri halal, dan *Islamic Fashion and Design*. Forum ini berhasil mempertemukan pimpinan industri, akademisi, pakar ekonomi pada sejumlah seminar untuk mendiskusikan ekonomi syariah, peluang kemitraan bisnis, serta *Islamic fashion* dan *design*.

Selain Presiden Joko Widodo, sejumlah Kepala Negara turut hadir pada acara tersebut. Para Kepala Negara tersebut antara lain Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak, Presiden Republik Tajikistan Emomali Rahmon, serta Presiden Republik Guinea Alpha Conde.

Teks Amelia Safitri

Menkeu Buka Masa Penawaran Sukuk Tabungan Seri ST-001



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi membuka masa penawaran Sukuk Tabungan Seri ST-001 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/08). Melalui peresmian ini, setiap Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat membeli Sukuk Tabungan selama masa penawaran pada 22 Agustus hingga 2 September 2016.

Pemesanan Sukuk Tabungan minimal sebesar Rp2 juta (berlaku kelipatan) dengan jumlah maksimal mencapai Rp5 miliar. Dengan tenor selama dua tahun, setelmen Sukuk Tabungan akan dilakukan pada 7 September 2016 dan akan jatuh tempo pada 7 September 2018. Nantinya, investor Sukuk Tabungan akan menerima imbalan secara tetap (*fixed rate*) yang dibayarkan setiap bulan. Meskipun bersifat tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*), sukuk tabungan dapat dicairkan sebelum

masa jatuh tempo, dengan memanfaatkan fasilitas *early redemption* setelah memasuki bulan ke-12.

Menkeu meyakini, selain berkontribusi bagi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sukuk Tabungan memiliki peran penting lainnya. “Sukuk Tabungan Seri ST-001 merupakan varian dari sukuk negara ritel. Ini merupakan suatu bukti bagi kita semua bahwa pemerintah sangat bersungguh-sungguh ingin tidak hanya mengembangkan instrumen pembiayaan bagi APBN, namun dengan munculnya seri ini juga diharapkan akan mendukung pengembangan pasar keuangan syariah nasional kita,” jelasnya.

Penerbitan Sukuk Tabungan, lanjutnya, sekaligus mewujudkan cita-cita pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam membiayai pembangunan. “Selama ini investor yang sifatnya institusi sudah *relatively familiar and well established*.

Saya ingin masyarakat umum juga memiliki kesempatan dan memiliki peran untuk ikut mendanai defisit dari fiskal ini,” tambahnya.

Lahirnya Sukuk Tabungan juga sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan berbagai instrumen investasi yang sesuai untuk setiap lapisan masyarakat. “Saya menyambut gembira pada hari ini kita bisa melakukan upaya yang terus-menerus dengan diversifikasi instrumen untuk menjangkau berbagai macam lapisan masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda-beda,” kata Menkeu.

Selain mendapat jaminan 100 persen dari pemerintah, Sukuk Tabungan ini dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini ditandai dengan dikantonginya fatwa dan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai informasi, pemesanan Sukuk Tabungan sendiri dapat dilakukan melalui 26 agen penjual yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Teks Novita Asri H.

Bambang Brodjonegoro, Akademisi yang Menjadi Menteri

Foto
Arfindo Briyan





Foto
Arfindo Briyan

Sejak akhir Juli lalu, mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro ditunjuk oleh Presiden menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Meski masa jabatannya sebagai Menkeu hanya sekitar sembilan belas bulan, Bambang sudah mengambil beberapa kebijakan penting, diantaranya memangkas subsidi bahan bakar minyak dan memperjuangkan amnesti pajak. Di kantor barunya, Media Keuangan berkesempatan berbincang ringan dengan putra bungsu Soemantri Brodjonegoro ini.

Seperti apa sosok Bambang Brodjonegoro saat masih menempuh pendidikan?

Sebenarnya ketika duduk di bangku SMA di Pangudi Luhur, saya mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Ketika itu, saya ingin seperti keluarga saya. Kebetulan ayah dan kedua kakak saya adalah Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Meski nilai saya cukup baik, tetapi saya tidak *happy*. Saya tidak cocok dengan ilmunya sehingga merasa terbebani. Kebetulan kedua kakak saya bersekolah di tempat yang sama, jadi para guru tau perbandingannya. Kakak pertama saya lulus dengan peringkat

satu, kakak kedua mendapat peringkat kedua, sedangkan saya cuma di peringkat sepuluh. Saya pikir akan sulit untuk menyamai mereka, apalagi saya juga tidak terlalu *enjoy*.

Bagaimana Anda bisa tertarik pada ekonomi?

Ibu menyuruh saya mengambil tes bakat. Kesimpulan tes tersebut adalah saya lebih cocok di bidang ilmu sosial. Selepas SMA saya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI). Ternyata sejak tahun pertama saya sangat menikmati proses perkuliahan. Meski banyak tugas tetapi saya melewatinya dengan semangat. Setelah lulus, saya memutuskan untuk menjadi dosen. Ini juga terpengaruh ayah dan kakak saya yang semuanya dosen. Sebagai dosen saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 dan fokus menjadi akademisi hingga *mentok* menjadi dekan. Saya sempat mencoba bekerja di *Islamic Development Bank* (IDB) hingga kemudian ditawarkan oleh Bapak Agus Martowardoyo untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Sejauh mana pengaruh orang tua terhadap kesadaran membangun Indonesia?

Ayah sempat dua kali menjadi menteri yakni sebagai Menteri Pertambangan dan Menteri Pendidikan Nasional. Beliau juga menjadi dosen sejak lulus kuliah. Pola ini sudah merasuk kepada kami anak-anaknya. Kakak pertama saya sudah menjadi birokrat dan menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi selama hampir sepuluh tahun. Sementara kakak kedua saya masih aktif di ITB sebagai Wakil Dekan. Kami semua berusaha mewujudkan nilai-nilai yang diwariskan ayah, yakni menjadi pendidik sekaligus mengabdikan kepada negara.

Meski sempat bekerja di organisasi internasional, ketika ada panggilan untuk kembali tentu saja saya memilih Indonesia. Di dalam darah saya sudah mengalir perhatian kepada negara. Ayah meninggal ketika saya berusia tujuh tahun. Semua nilai-nilai ayah disampaikan oleh ibu dan kakak-kakak yang sempat berinteraksi lebih lama dengan beliau.

Selain keluarga, siapa tokoh yang paling menginspirasi Anda?

Sejak saya lahir tahun 1996 hingga tahun 1975, keluarga saya tinggal di Jalan Brawijaya. Rumah tersebut dulu milik Ford Foundation. Saat terjadi peristiwa G30-S/PKI, Ford Foundation memutuskan untuk

menghentikan sementara operasinya di Indonesia. Rumah tinggal yang mereka miliki kemudian diberikan kepada dosen FE UI yang mereka beri beasiswa. Di antaranya para ekonom seperti Pak Widjoyo Nitisaastro, Pak Ali Wardhana, dan Pak Subroto.

Sebenarnya ayah tidak termasuk orang FE UI karena beliau berlatar belakang teknik. Tetapi kebetulan saat itu di tahun 1964 beliau menjabat sebagai rektor UI sedangkan Pak Widjoyo adalah dekan FE UI dan Pak Ali Wardhana Pembantu Dekan. Mereka kemudian merasa tidak enak hati jika dosen FE UI mendapat rumah sementara rektornya tidak punya rumah. Ketika itu ayah disewakan rumah di Jalan Pulo Raya. Akhirnya rumah direktur Ford Foundation Indonesia diberikan kepada ayah. Keluarga kami kemudian bertetangga dan banyak berinteraksi. Merekalah yang membentuk pandangan saya akan fondasi ekonomi Indonesia. Ketika saya masuk FE UI, interaksi kami lebih intens lagi. Jadi dari sisi pilihan karir merekalah panutan saya.

Apa yang Anda rasakan ketika memasuki dunia pemerintahan?

Menjadi akademisi itu menarik. Setiap berinteraksi dengan dunia kampus, seperti saat saya memberi kuliah umum di UI minggu lalu, selalu timbul rasa *kangen*. Tetapi kombinasi tugas di birokrasi dan akademis sangat memperkaya pengalaman, terutama jika suatu saat saya kembali ke kampus.

Dulu saya mengajar hanya dengan *text book* atau jurnal. Memang ada studi empiris yang bisa diajarkan, misalnya tentang pengentasan kemiskinan di Brazil. Tetapi saya tidak bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi di Brazil. Sedangkan jika terlibat langsung dalam suatu program, berhasil atau gagal, saya

akan paham betul latar belakangnya. Dengan begitu, ketika menjelaskan ke mahasiswa, saya bisa sampaikan teori maupun praktiknya. Saat awal bergabung dengan eksekutif, saya sempat bertanya-tanya, apakah saya bisa bertahan. Tetapi setelah berjalan sekitar tiga tahun, saya merasa apa yang saya dapat di dunia akademik punya nilai tambah di birokrasi dan demikian pula sebaliknya. Saya jadi tahu tidak semua teori bisa diterjemahkan dalam dunia nyata. Setiap kebijakan yang diambil juga memerlukan kompromi politik dan beragam penyesuaian.

Bagaimana hubungan Anda dengan menteri-menteri lain di kabinet?

Saat menjadi Menkeu, posisi tersebut saya rasa ada lebih kurangnya. Di satu sisi, semua Kementerian/Lembaga lain pasti berharap mendapat perhatian dan anggaran yang lebih besar. Di sisi lain, hal tersebut memberi tekanan bagi Menkeu untuk mengatur belanja. Apalagi sejak harga migas jatuh, peran Menteri ESDM berkurang dan peran Menkeu menjadi semakin besar dalam mengejar penerimaan. Tanggung jawab ini luar biasa. Kebutuhan belanja selalu tinggi, sementara jika penerimaan kita paksaan naik, akan berpotensi mengganggu dunia usaha. Dalam hal ini yang penting Presiden bisa memimpin menteri-menterinya untuk tetap satu pandangan dan kompak demi mencapai tujuan pemerintah.

Setelah memperjuangkan UU Amnesti pajak, apa harapan Anda?

Amnesti pajak merupakan peluang besar untuk memperkuat aliran modal dan meningkatkan investasi. Selain itu, amnesti pajak sangat baik untuk memperkuat basis pajak. Saat ini basis pajak kita tidak akurat dan jumlahnya jauh

di bawah yang seharusnya. Dengan orang ikut amnesti, basis pajak kita bisa lebih lengkap dan penerimaan kita bisa lebih tinggi. Pelaksanaannya harus benar-benar kita dorong. Apalagi amnesti pajak sifatnya *self assessment* sehingga membutuhkan kesadaran wajib pajak sendiri. Agar amnesti pajak sukses, saya harap Menkeu Sri Mulyani dapat memberi pendekatan khusus kepada pembayar pajak besar agar benar-benar berpartisipasi.

Sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas apa yang ingin Anda lakukan?

Saya pernah menjadi Menkeu sehingga tahu susahnyanya cari *duit*. Sebab itu, saya ingin belanja kita efisien dan tepat sararan. Saya akan memastikan agar rencana belanja yang kami susun berdampak pada ekonomi tanpa membebani APBN. Anggaran yang baik bukan semata besar, tetapi tepat sasaran, baik dari sisi kelompok penerima maupun prioritas setiap tahunnya. Contohnya tahun ini prioritas kita adalah infrastruktur, maritim, industri manufaktur, serta pariwisata. Jadi bukan bagi rata agar semua senang tetapi negara ini berjalan tanpa tujuan.

Apa rencana Anda untuk memperkuat kerjasama Bappneas dan Kemenkeu?

Ada dua area yang penting yaitu perencanaan dan penganggaran. Supaya beban APBN tidak terlalu berat, perencanaannya harus baik. Selain itu, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran juga harus baik. Kadang-kadang ada perencanaan yang berorientasi masuk ke penganggaran, ada pula penganggaran yang melakukan fungsi perencanaan. Saya ingin usulkan kepada Menkeu agar batasnya diperjelas. Bappenas mengurus perencanaan sampai level *project* kegiatan dan Kemenkeu kemudian membuat penganggarannya.

Teks Irma Kesuma

Pengawasan Internal Untuk DJP Lebih Baik

Inspektorat I, Inspektorat Jenderal



Berbicara mengenai sejarah Inspektorat I tak akan lepas dari cerita panjang pembentukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan. Pada Kabinet Ampera tahun 1966, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan pertama kali dibentuk. Seiring dengan penyempurnaan organisasi pemerintah pada masa Rencana Pembangunan Lima Tahun, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 405/KMK/6/1975. Dalam Pasal 189 KMK tersebut, salah satu susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah Inspektorat Jenderal.

Penyempurnaan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus dilakukan demi kebutuhan organisasi yang terus meningkat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014, maka unit di Inspektorat Jenderal yang menangani DJP bertransformasi dari Inspektorat Pajak menjadi Inspektorat I. Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Inspektur I Kementerian Keuangan Elman Ritonga menjelaskan seluk-beluk unit yang dipimpinnya.

Inspektorat I dalam perannya sebagai aparat pengawas intern melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada DJP dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan intern yang dilakukan meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Hal unik yang membedakan Itjen dengan unit lainnya di Kementerian Keuangan struktur organisasinya terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Tiap-tiap JFA dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok, yaitu seorang Auditor Madya yang setara dengan Pejabat Eselon III. Inspektorat I terdiri dari Koordinator Kelompok JFA I.1 hingga JFA I.5. Keseluruhan kegiatan administrasi didukung oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha.

Tema Pengawasan Unggulan

Dalam menjalankan kebijakan pengawasan intern, Inspektorat I mengacu pada Tema Pengawasan Unggulan (TPU) yang menjadi kegiatan prioritas Itjen bersama DJP. Setiap tahunnya, Itjen memiliki empat hingga enam Tema Pengawasan Unggulan. “Tahun 2016 ini kami memiliki 4 TPU,” kata Elman.

Keempat TPU tersebut antara lain

Pengawasan terhadap Pelaksanaan e-Faktur, Peningkatan Efektivitas Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak e-SPT melalui Audit, Peningkatan Efektivitas Penanganan Permohonan Keberatan, Permohonan Banding, dan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali melalui Audit, dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya. Penyusunan TPU ini melibatkan pejabat Eselon II dan III dari DJP yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tema Pengawasan Unggulan.

Di samping itu juga ada tema lainnya, yaitu Audit Kinerja terhadap Pengawasan Khusus, Audit Atas Bukti Permulaan, *Free Trade Zone*, Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor, Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Data Dan Informasi Dari Data ILAP (Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain). Umumnya TPU ini berganti setiap tahun, bergantung pada analisis risiko. Setiap Koordinator Kelompok bertanggung jawab pada suatu TPU.

Pada pelaksanaannya, penyusunan TPU dimulai bulan Juni untuk TPU tahun depan. Selanjutnya, konsep TPU disampaikan ke Inspektorat VII. Nantinya seluruh TPU akan dibahas oleh Tim Pembahas Tema Pengawasan (TPTP). TPTP ini terdiri dari para auditor lintas



inspektorat. Dalam diskusi dan rapat yang diselenggarakan TPTP, konsep TPU seluruh unit akan diperkaya dan dikritisi. Intinya, TPU diusulkan oleh Inspektorat I bersama dengan masukan dari atasan, kemudian didiskusikan bersama DJP. “Kami ingin membantu mereka (DJP) mewujudkan *good governance*,” tegas Elman.

Sosialisasi

Tahun ini, Inspektorat I telah melakukan Sosialisasi Pengawasan Itjen sebanyak dua kali, di Surakarta dan Bali. Inspektorat I memaparkan hasil pengawasan dengan tujuan kasus yang terjadi di lokasi lain tidak terjadi berulang. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh para Kepala Kantor Pelayanan Pajak beserta Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Pejabat Fungsional *Account Representative*, serta Pemeriksa.

Sumber Daya Manusia

Kini Inspektorat I ditopang oleh 55 orang pegawai. Komposisi pegawai terdiri dari Inspektur, Auditor Madya,

Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Pelaksana Lanjutan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Auditor yang diperbantukan di Inspektorat Bidang Investigasi (IBI), dan pegawai tugas belajar.

Peningkatan kompetensi pegawai terus dilakukan melalui berbagai program diklat. Ada pula beberapa pegawai yang dikirim untuk mengikut program pelatihan di luar negeri yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Diakui Elman, seluruh pegawai Inspektorat I harus memahami pengetahuan teknis terkait perpajakan. Namun kecanggihan teknologi saat ini semakin memudahkan pembelajaran. Kini setiap pegawai dilengkapi dengan *Tax Base*, yaitu sebuah aplikasi di komputer yang berisi segala informasi mengenai pajak.

Mendukung Amnesti Pajak

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Noomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan (amnesti) Pajak, Kementerian Keuangan bergerak cepat melakukan publikasi di segala lini.

Inspektorat I pun menyadari bahwa tak hanya DJP, namun seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan, juga bergerak bersama untuk menyukseskan program amnesti pajak. Itjen melalui Subbagian Komunikasi Publik juga telah melakukan *workshop* untuk meningkatkan *awareness* pegawai terhadap program amnesti pajak.

Kini Inspektorat I mendukung cita-cita bersama Itjen dalam rangka menuju IACM (*Internal Audit Capability Model*) yaitu tools yang digunakan untuk menilai kapabilitas internal audit di sektor publik. IACM ini merupakan *benchmarking* internal audit di seluruh dunia. Saat ini, Itjen Kemenkeu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berada di IACM level 3, level tertinggi di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Inspektur Jenderal K.A. Badaruddin, Itjen kini berusaha meraih IACM level 4. Peningkatan mutu organisasi terus dilakukan demi mewujudkan visi Inspektorat I, yaitu “Menjadi Unit Audit yang Profesional dan Berintegritas Untuk Mewujudkan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Perpajakan.”

Foto Bagus Wijaya

Teks Pradany Hayyu

H.E. Sri Mulyani Indrawati

Minister of Finance

Republic of Indonesia

Foto
Anas Nur Huda



Pulang Kampung

Melepas jabatan bergengsi dunia
Sri Mulyani baktikan diri kembali ke
nusantara membangun ekonomi
demi tanah air yang sejahtera.

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, mungkin pepatah ini sesuai untuk menggambarkan sebagian perjalanan hidup anak ketujuh pasangan Satmoko dan Retno Sriningsih. Terang saja, profesi kedua orangtuanya sebagai seorang akademisi dan guru besar ternyata menurun pada wanita kelahiran Tanjung Karang, Bandar Lampung, 26 Agustus, 54 tahun lalu.

Sejak semester akhir di jurusan ekonomi Universitas Indonesia tahun 1986, Sri Mulyani menjadi asisten pengajar di kampusnya. Dua tahun kemudian, istri dari Tony Sumartono ini melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar *Master of Science of Policy Economics dan Doctor of Economics* di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Sekembalinya ke tanah air, Sri Mulyani mengabdikan diri pada almamaternya dengan aktif sebagai peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM UI). Berkat ketekunannya, ia akhirnya dipercaya sebagai Kepala LPEM UI di tahun 1998. Disinilah sosoknya lebih dikenal publik sebagai dosen serta

pengamat ekonomi. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga kerap terlibat sebagai penasihat pemerintah dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Wanita Pertama

Pada tahun 2001, Sri Mulyani hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat dan menjadi konsultan pada US Agency for International Development (USAID). Kala itu, dirinya dipercaya untuk memberikan saran mengenai bagaimana mendesain program pasca sarjana (S2) untuk pendidikan universitas di daerah maupun program USAID lainnya di Indonesia, terutama program ekonomi.

Spesialis penelitian ekonomi moneter dan perbankan serta ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi *Executive Director* Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group) pada awal Oktober 2002. Sejak itu, Sri Mulyani menjadi wanita pertama dari Indonesia sekaligus wakil 12 negara anggota SEA Group yang menduduki posisi yang menentukan bagi berbagai program dan keputusan di *International Monetary Funds* (IMF).

Selanjutnya, Sri Mulyani terlibat dalam pemerintahan di dalam negeri.

Sepak terjangnya berawal saat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mempercayakan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.

Setahun setelahnya, pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Pada saat itu, Sri Mulyani mencetuskan reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan hingga memberikan banyak perubahan yang signifikan. Sri Mulyani Indrawati dinilai mampu menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang *prudent*, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.

Pencapaian ini menorehkan prestasi hingga ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Pada tahun yang sama, Sri Mulyani meraih gelar Menteri Keuangan terbaik dari majalah *Euromoney*.

Lalu pada 2007, Sri Mulyani dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi

majalah Globe Asia. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008.

Tak lama kemudian, saat masih menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia merangkap jabatan karena menggantikan Boediono yang dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Dengan demikian, tiga jabatan Menteri yang pernah disandang Sri Mulyani menjadi pertama kalinya dipimpin oleh seorang wanita. Ketiga jabatan tersebut, yaitu Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta Pelaksana Tugas Menko Perekonomian.

Pada Juni 2010 Sri Mulyani didaulat menjadi Direktur Pelaksana (Managing Director) Bank Dunia (World Bank) serta bertugas sebagai Chief Operating Officer. Sri Mulyani bertanggung jawab untuk operasi di semua wilayah dan jaringan meliputi bidang tematik pembangunan manusia, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, pengelolaan ekonomi, serta pengembangan sektor keuangan dan swasta.

Enam tahun berselang, Sri Mulyani memutuskan mengundurkan diri dari posisinya di Bank Dunia dan menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk memperkuat pemerintahan, khususnya di sektor ekonomi. Akhirnya, pada 27 Juli 2016, Sri Mulani dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Tahun ini, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai Power Women 2016 atau wanita paling berpengaruh di dunia pada peringkat ke-37 versi majalah Forbes. Dengan predikat ini, Sri Mulyani menjadi satu-satunya wanita Indonesia yang masuk dalam daftar 100 orang

berpengaruh di dunia dari sekitar 29 negara. Sri Mulyani dinobatkan sebagai wanita berpengaruh ke-9 dalam sektor keuangan, perbankan, dan modal ventura di dunia.

Menjadi teladan

Sore itu, lobi gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan tidak seperti hari-hari biasanya. Tampak puluhan pegawai berjajar dari depan pintu masuk hingga tangga menuju lantai Mezzanine. Puluhan wartawan pun siap dengan kamera di tangan. Mereka menantikan momen kedatangan perempuan pertama yang pernah memimpin institusi keuangan negara tahun 2004 silam.

Ialah Sri Mulyani Indrawati yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro pada Kabinet Kerja Jilid II, Rabu (27/7) lalu. Usai menghadiri pelantikan 12 Menteri Negara Kabinet Kerja dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di istana negara, Sri Mulyani bergegas menuju Kementerian Keuangan mengikuti acara serah terima jabatan.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa tugas yang diembannya tidak mudah. “Saya menyadari situasi ekonomi sangat tertekan terutama dari lingkungan internasional maupun dari dalam negeri. Kita akan bersama-sama menjalankan tugas ini. Tidak hanya mendukung tujuan nasional tetapi juga menggunakan anggaran untuk mendukung keseluruhan tugas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar menjalankan perannya secara efisien dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan amanat dari Presiden Joko Widodo kepada

dirinya. Menurutnya, Presiden meminta agar penggunaan instrumen fiskal lebih diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembalikan kepercayaan publik. “Tidak mungkin menjalankan fungsi ekonomi hanya mengandalkan APBN. Jadi kami menggunakan itu (instrumen fiskal) untuk bisa menciptakan kemakmuran bersama, menciptakan kesempatan kerja mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” tambahnya.

Sementara terkait organisasi, Sri Mulyani berharap agar seluruh jajarannya terus-menerus memperbaiki kinerja. Sri Mulyani memandang bahwa Kementerian Keuangan merupakan salah satu institusi penting yang menjadi harapan masyarakat. Oleh karena itu, lanjutnya, kinerja Kementerian mencerminkan kualitas birokrasi dan memberikan kepercayaan terhadap kinerja dari birokrasi Republik Indonesia.

“Saya berharap Kementerian Keuangan bisa terus menjadi contoh, teladan bagi kinerja birokrasi di Indonesia. (Menjadi) Birokrasi yang tidak mempersulit, birokrasi yang memiliki semangat melayani, birokrasi yang transparan dan birokrasi akuntabel serta professional. Saya tau nilai-nilai itu sudah ada. Tugas saya untuk menyuburkannya sehingga bisa betul-betul tercermin dan terlihat oleh seluruh masyarakat dan *stakeholders* di luar,” ungkapnya.

Terakhir, Sri Mulyani mengharapkan dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan media. “Saya mohon doa restu dari semuanya. Saya yakin Indonesia akan mampu menghadapi situasi ekonomi ini dan bahkan menjadi lebih baik lagi.”



Foto
Anas Nur
Huda

Teks lin Kurniati

Belanja Dipangkas Demi Anggaran Berkualitas

Dalam rancangan APBN 2017, belanja infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama.

Foto Githa Adhi Pramana



Tak lama setelah kembali dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana kebijakan penyesuaian anggaran dalam APBN-P 2016 kepada publik. Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga dikurangi Rp 65 triliun dan belanja daerah dipotong Rp68,8 triliun. Pemangkasan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas APBN-P 2016.

Perlambatan ekonomi global telah mendorong penurunan harga komoditas di pasar internasional. “(Penurunan) harga komoditas ini mengontribusikan penurunan pada penerimaan negara sebesar Rp108 triliun,” kata Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (5/8). Pada saat yang sama, selisih penerimaan pajak pada akhir tahun diperkirakan sebesar Rp219 triliun dari target dalam APBN-P. Meskipun belanja dipangkas, Menkeu yakin pertumbuhan ekonomi masih tetap terjaga. “Kami lihat pematongannya tidak memotong anggaran infrastruktur,” kata dia kepada wartawan se usai menutup World Islamic Economic Forum yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (4/8).

RAPBN 2017

Sepanjang 2016, situasi ekonomi global masih menghadapi banyak tantangan. Selain harga komoditas yang masih relatif rendah, perdagangan dunia juga masih melambat. Sebagaimana dikutip dari Keterangan Pers RAPBN 2017 pada portal www.kemenkeu.go.id yang dikeluarkan Selasa (16/8), situasi tersebut berimbas pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan, antara lain dengan dengan menjaga daya beli masyarakat dan percepatan belanja pemerintah, sehingga perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lima persen pada semester I tahun ini.

Untuk menjaga pelaksanaan APBN-P 2016, pemerintah melakukan sejumlah langkah konsolidasi fiskal, antara lain dengan melakukan koreksi proyeksi penerimaan perpajakan dan pengendalian belanja. Langkah-langkah konsolidasi fiskal di tahun ini menjadi salah satu landasan dalam penyusunan RAPBN 2017 yang rasional dan kredibel.

Kondisi ekonomi global yang masih lemah diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2017, sehingga fokus pemerintah adalah terus mengefektifkan

belanja pemerintah sesuai prioritas. Tiga prioritas utama meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM terutama bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan. Sementara itu, usaha untuk menaikkan investasi dilakukan dengan terus mempermudah dan memperbaiki kegiatan iklim dunia usaha, misalnya melalui peluncuran paket kebijakan. Paket-paket kebijakan diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih berkualitas dan berkesinambungan, mengefisienkan birokrasi dan ekonomi di dalam negeri, serta meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam RAPBN 2017, pemerintah mengajukan rencana pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 triliun. Kebijakan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 diarahkan untuk lebih memberikan kepastian dan momentum ruang gerak perekonomian. Dari target tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp240,4 triliun. Untuk mencapai target penerimaan ini, pemerintah akan mengambil berbagai kebijakan strategis,

salah satunya di bidang perpajakan. “Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016,” kata Presiden Jokowi saat membacakan RAPBN 2017 dan Nota Keuangannya di hadapan DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa (16/08). Selain itu, kebijakan di bidang perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif. Kebijakan di bidang PNBP ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pada sisi lain, belanja negara tahun 2017 direncanakan sebesar Rp2.070,5 triliun. Belanja pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp1.310,4 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp760 triliun. Berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara tersebut, defisit anggaran pada RAPBN

tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Selain postur, Presiden Jokowi dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan asumsi-asumsi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,3 persen, inflasi diperkirakan pada kisaran empat persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan pada kisaran Rp13.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Untuk indikator ekonomi lainnya, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan diperkirakan pada kisaran 5,3 persen, harga *Indonesia Crude Price* (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai 45 dolar AS per barel, serta *lifting* minyak dan gas bumi tahun 2017 diperkirakan masing-masing mencapai 780 ribu barel per hari dan 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Ditemui di Bandung, Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia Nury Effendi mengungkapkan bahwa program-program pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dinilai lebih berat pada sisi penawaran, terutama pembangunan infrastruktur. “*Supply side* itu akan berdampak pada

ekonomi dalam jangka agak panjang,” kata Nury pada Rabu (10/8).

Pada jangka pendek, Presiden Jokowi disarankan memberikan perhatian lebih pada program-program yang memperhatikan kebersinambungan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pembangunan yang inklusif. “Jangan sampai kehilangan momentum. APBN itu harus juga memperhatikan tiga hal tadi,” ujar Nury.

Sementara di tempat berbeda, Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan Roslani mengapresiasi fokus pemerintahan Presiden Jokowi pada sektor infrastruktur. Menurut Rosan, di samping pembangunan infrastruktur-nya, pemerintah dipandang perlu mendorong perkembangan sektor industri yang mendukung. Rosan memberikan contoh pengembangan industri baja yang dapat menyokong berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik, bandara, dan sarana infratraktur lainnya. “Proyeknya sudah ada dalam program pemerintah, jadi industri penunjangnya juga seharusnya tumbuh,” ujar Rosan yang ditemui Media Keuangan di Jakarta belum lama ini.



Martin Daniel Siyaranamual
Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Padjajaran

"Menteri Keuangan melakukan pemotongan anggaran dalam APBNP 2016 untuk mengurangi risiko terlampauinya defisit. Berdasarkan undang-undang, defisit anggaran adalah sebesar tiga persen. Mengurangi pengeluaran pemerintah adalah pilihan yang tepat, sebab jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran undang-undang.

Yang seharusnya perlu dipertanyakan adalah apakah defisit anggaran sebesar tiga persen itu tepat di tengah kondisi seperti ini. Menurut saya pribadi, defisit anggaran seharusnya dibuka hingga empat atau lima persen. Apalagi jika melihat target penerimaan sebesar 165 triliun rupiah dari kebijakan amnesti pajak. Dari jumlah yang sudah dikumpulkan, hasil kinerja dari amnesti pajak masih harus ditingkatkan untuk bisa mencapai target dengan waktu yang sudah ditentukan.



Rosan Roslani
Ketua Kamar Dagang Indonesia

"Tentunya jika kebijakan amnesti pajak sukses akan membantu pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, kami melihat dana yang masuk tidak seluruhnya bisa langsung digunakan di sektor riil. Dana itu akan masuk ke instrumen pasar modal dan perbankan. Kami berharap dana amnesti pajak bisa mendorong konsumsi domestik.

Saya berbicara dengan teman-teman pengusaha, jika dibandingkan dengan tahun lalu, *trust* dan *confident* terhadap

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II sebesar 5,18 persen atau lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan pada triwulan I sebesar 4,91 persen harusnya bisa dilihat dengan perspektif di mana Indonesia dikategorikan sebagai *small-open economy*. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa dilihat dari kinerja pemerintah, tetapi juga dari kondisi perekonomian secara global. Jika melihat kondisi perekonomian dunia yang tidak terlalu cerah, asumsi pertumbuhan sebesar 5,2 persen dapat dipenuhi jika dan hanya jika lokomotif perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan kinerjanya.

Siapa yang harus jadi lokomotif perekonomian Indonesia? Seharusnya adalah sektor swasta. Kurang tepat jika di kondisi saat ini pemerintah tetap berkeinginan untuk menjadi lokomotif perekonomian melalui BUMN dan anggaran belanja pemerintah."

ekonomi tahun ini jauh lebih baik. Ada banyak kebijakan pemerintah yang positif. Misalnya paket kebijakan ekonomi. Kami mengharapkan implementasinya tidak terlalu lama. Kemudian kebijakan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa yang semakin besar itu juga positif. Kita ingin pembangunan harus merata. Selama ini pembangunan masih belum merata, kurang efisien, dan biaya logistik juga masih tinggi."



Nury Effendi
Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia

"Jika belanja tidak dipangkas sekarang, defisit anggaran bisa membesar dan memberikan dampak yang tidak favorable pada ekonomi. Namun, selain masalah besaran yang harus dipangkas, pertanyaan penting dalam kebijakan seperti ini adalah masalah timing. Melalui pemangkasan anggaran, Menteri Keuangan ingin memberikan sinyal, semacam sense of reality, bahwa inilah kita. Menteri Keuangan juga ingin menunjukkan kesan kuat bahwa lebih baik pemangkasan dilakukan sekarang karena mungkin jika dilakukan nanti-nanti akan dianggap jebol di belakang. Di samping itu juga perlu dilakukan saat ini agar pemerintah mempunyai ruang untuk memikirkan kebijakan-kebijakan lain.

Saya menilai asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBNP bisa dicapai. *No doubt*. Kalaupun turun, penyebabnya adalah faktor eksternal, misalnya pengaruh perekonomian Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, atau dampak Brexit.

Jika boleh memberikan sedikit masukan terhadap RAPBN 2017, mungkin perlu ada nuansa keberpihakan, misalnya terhadap golongan menengah ke bawah dan masalah lingkungan. Saat ini, kata kunci di berbagai belahan dunia adalah *sustainability* dan *equality*. Jadi paling tidak, dua hal itu dapat diakomodasikan."

Teks Dwinanda Ardhi

MENUJU APBN YANG BERKUALITAS & AKUNTABEL

10 Prinsip IMPLEMENTASI TRANSPARANSI FISKAL



Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencari, menerima, dan mengolah kembali data anggaran



Pemerintah harus mempublikasikan kebijakan fiskal atau perubahannya dan menjelaskan apabila terdapat penyimpangan dibanding rencana semula



Data yang disediakan untuk publik meliputi data keuangan dan non keuangan pada masa lalu, saat ini, dan perkiraan aktivitas fiskal di masa yang akan datang, risiko fiskal, aset dan utang publik.



Pemerintah harus menjelaskan capaian output yang menggunakan sumber-sumber penerimaan (perpajakan) dari masyarakat.



Seluruh transaksi keuangan sektor publik harus berlandaskan ketentuan yang berlaku.



Pengelolaan keuangan sektor publik harus diungkap dan dilaporkan secara jelas dan transparan termasuk hubungan keuangan sektor publik dengan sektor swasta



Peran dan tanggung jawab lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menghimpun dana masyarakat harus ditetapkan dengan Undang-Undang.



Kewenangan untuk menaikkan tarif pajak atas nama masyarakat harus dipegang oleh lembaga legislatif.



Badan Pemeriksa Keuangan harus memiliki independensi yang kuat dari lembaga eksekutif.



Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam implementasi kebijakan publik.

Upaya-upaya PENINGKATAN INISIATIF OPEN DATA APBN



Disajikan selengkap-lengkapny, kecuali untuk data yang dinyatakan rahasia oleh negara.



Data primer, langsung dari sumber yang dapat dipercaya.



Disajikan tepat waktu.



Dapat dengan mudah diakses oleh publik, baik melalui sarana fisik maupun elektronik.



Format data disajikan dalam bentuk yang mudah diolah kembali oleh pengguna.



Tidak mengandung unsur diskriminasi untuk memperoleh data.



Format data yang disajikan tidak terkendala lisensi.



Data disediakan sebagai bagian dari layanan publik.



Data series dapat ditemukan dengan mudah dan biaya murah.



Tidak mengenakan biaya sedikitpun baik untuk keperluan duplikasi data, biaya penelitian, biaya pengolahan, dll.



NEXT EVENT :
**FISCAL TRANSPARENCY PORTALS:
DIALOGUE FOR A FRIENDLY AND MEANINGFUL OUTCOME**
JAKARTA, 13-14 SEPTEMBER 2016
VENUE : KEMENTERIAN KEUANGAN RI & PULLMAN HOTEL THAMRIN





Beras: Dulu, Sekarang, dan Yang Akan Datang

Teks Tri Wibowo

“Tetapi engkau, engkau pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, engkau adalah generasi baru. Engkau adalah generasi yang akan datang. Engkaulah yang bertanggung jawab atas nasib bangsamu di masa depan. Aku bertanya padamu: rakyat Indonesia akan mengalami celaka, bencana, malapetalaka dalam waktu yang dekat kalau soal makanan rakyat tidak dipecahkan, sedangkan soal persediaan makanan ini bagi kita adalah soal hidup atau mati.

Engkau, pemuda-pemudi, engkau terutama sekali harus menjawab pertanyaan itu, sebab hari kemudian adalah hari-harimu, alam kemudian adalah alammu bukan alam kami kaum tua yang *vroeg of laat* (lambat laun) akan

dipanggil ke Rahmatullah.” (Cuplikan Pidato Presiden Soekarno tentang pangan pada 27 April 1952)

Pidato Presiden Soekarno pada 54 tahun yang lalu tentang pangan sangat jelas dan gamblang memberikan gambaran bagaimana kondisi kekurangan beras pada saat itu. Dengan jumlah penduduk tahun 1952 sebesar 75 juta jiwa dan konsumsi beras per kapita setahun sebesar 86 kg, Indonesia membutuhkan beras setara 6,45 juta ton.

Sementara itu, produksi dalam negeri hanya mencapai 5,5 juta ton atau terjadi defisit beras hampir satu juta ton dalam setahun. Kekurangan tersebut ditutup dengan impor beras dari negara tetangga seperti Siam (Thailand), Saigon (Vietnam), dan Birma (Myanmar).

Meskipun kekurangan beras, pada

Foto
Dok. Biro KLI

waktu itu keanekaragaman pangan Indonesia sangat variatif. Beras bukanlah satu-satunya makanan pokok karena ada penyesuaian dengan komoditas pangan unggulan di masing-masing daerah. Penduduk Madura mengandalkan jagung sebagai makanan pokok, penduduk Gunung Kidul dengan gaplek, sedangkan penduduk Indonesia bagian timur dengan sagu dan ubi jalar.

Seiring dengan perkembangan zaman, keanekaragaman makanan pokok masing-masing daerah tersebut tinggal menjadi sebuah cerita. Berbicara pangan hari ini menjadi identik dengan membicarakan beras. Konsumsi beras per kapita saat ini mencapai 139 kg beras per kapita per tahun. Walaupun produksi beras dalam negeri terus bertambah, peningkatan konsumsi beras seiring pertumbuhan penduduk jauh lebih besar. Tiap tahun impor beras dibutuhkan untuk menutupi kesenjangan antara konsumsi dan produksi.

Menuju swasembada beras

Pada periode 1970–1990, produksi beras nasional meningkat pesat. Pada 1970, produksi padi hanya sebesar 19,3 juta ton. Angka itu naik menjadi 29,7 juta ton pada 1980. Sementara pada 1990, produksi padi meningkat lagi menjadi 45,2 juta ton. Bahkan pada 1986, Indonesia mampu mencapai swasembada beras. Kebutuhan beras nasional dapat tercukupi dari produksi dalam negeri.

Pada tahun 2000, produksi padi sebesar 52 juta ton dan pada tahun 2010 naik menjadi 65 juta ton. Produksi ini tidak mampu lagi mengimbangi kebutuhan konsumsi beras, seiring dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk. Indonesia pun masuk lagi sebagai negara importir beras. Berdasarkan angka ramalan (Aram) II dari

Badan Pusat Statistik (BPS, 2015), produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 4,15 juta ton (5,85 persen) dibandingkan tahun 2014. Dari total produksi padi nasional tersebut, produksi beras di Pulau Jawa menyumbang sebesar 38,38 juta ton (51 persen) dan luar Pulau Jawa sebesar 36,61 juta ton (49 persen).

Dari sisi luas panen, Pulau Jawa menyumbang luas area panen sebesar 6,4 juta Ha (45 persen) dan luar Pulau Jawa seluas 7,8 juta Ha (55 persen). Dengan data tersebut, produktivitas Pulau Jawa (5,99 ton/Ha) jauh melampaui luar Pulau Jawa (4,78 ton/Ha). Pulau Jawa dengan produktivitas tinggi tidak lagi memungkinkan untuk perluasan lahan (ekstensifikasi). Di sisi lain, luar Pulau Jawa yang masih memungkinkan perluasan lahan mempunyai produktivitas yang lebih rendah.

Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 275 juta jiwa dan memerlukan beras sebesar 38 juta ton. Untuk memproduksi besar sejumlah tersebut, dengan asumsi tingkat produktivitas padi sebesar 5,03 ton/Ha, diperlukan area tanam seluas 15 juta Ha. Dengan luas area tahun 2015 seluas 13,80 juta Ha, dalam lima tahun mendatang minimal perlu dibuka area sawah baru seluas satu juta hektar untuk mencukupi kebutuhan beras nasional agar tidak lagi tergantung impor.

Dukungan kebijakan

Sebagai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Amandemen UU Nomor 7 Tahun 1996), negara berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk

ketahanan pangan. Anggaran ini dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui subsidi pangan (beras miskin) dan peningkatan produksi pangan melalui subsidi pupuk.

Anggaran untuk ketahanan pangan pada tahun 2010 sebesar Rp52,2 triliun. Anggaran ini bertambah menjadi Rp125,9 triliun pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan 2,4 lipat selama lima tahun. Padahal, belanja negara pada 2010 sebesar Rp1.042 triliun telah meningkat menjadi Rp1.984 triliun pada tahun 2015. Namun, peningkatan ini belum mencapai dua kali lipat selama lima tahun. Alokasi ini memberikan bukti bahwa dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah telah memberikan prioritas yang tinggi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Dari sisi peningkatan produksi pangan, alokasi anggaran untuk ketahanan pangan terbesar dalam bentuk subsidi pupuk. Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan produksi pangan terlihat dari alokasi subsidi pupuk dalam APBN. Pada tahun 2005, anggaran subsidi pupuk yang hanya sebesar Rp2,5 triliun, naik menjadi sebesar Rp30 triliun pada tahun 2016 atau mengalami kenaikan 12 kali lipat. Dari sisi jumlah pupuk yang disalurkan, pada tahun 2005 sebesar 5,7 juta ton, naik menjadi 9,5 juta ton pada tahun 2016.

Penyaluran subsidi pupuk

Untuk mencapai surplus beras nasional, tidak bisa dipungkiri bahwa petani merupakan garda terdepan produksi pangan nasional. Kunci produksi beras di Indonesia berada di tangan petani. Untuk meningkatkan daya beli petani dalam membeli pupuk, pemerintah memberikan subsidi pupuk. Subsidi pupuk diberikan oleh pemerintah kepada petani

dalam bentuk pengurangan harga di bawah harga pasar yang semestinya.

Dalam pelaksanaannya, pupuk bersubsidi banyak menuai kritik, terutama terkait efektivitas penyalurannya kepada petani sasaran. Terdapat wacana subsidi pupuk akan disalurkan langsung kepada petani dalam bentuk *cash transfer*. Selama ini, pemerintah menyalurkan subsidi pupuk melalui perusahaan pupuk PT. Pupuk Indonesia dan disalurkan secara berjenjang melalui produsen, pengecer, dan baru kepada petani sasaran.

Panjangnya rantai penyaluran pupuk sampai ke petani penerima sering diduga sebagai penyebab terjadinya salah sasaran dan kelangkaan pupuk di pasaran. Aturan yang terlalu rigid juga diduga menyebabkan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi terkendala, sehingga petani terlambat menerima pupuk. Dengan *cash transfer*, diharapkan petani dapat sewaktu-waktu membeli pupuk bersubsidi sesuai kebutuhannya.

Namun demikian, program ini perlu dipersiapkan secara matang. Uji coba pelaksanaan penyaluran pupuk secara langsung ke petani di Karawang Barat dan Cikampek pada tahun 2010 telah mengalami kegagalan. Validitas data petani penerima pupuk merupakan kendala utama. Selama ini, data petani penerima pupuk mengandalkan data dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Data RDKK tersebut belum terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Apabila penyaluran penyaluran subsidi pupuk langsung kepada petani

dilakukan melalui kartu elektronik, maka perlu didukung data yang valid. Salah satunya adalah identitas petani dengan data NIK. Tanpa adanya NIK pada data RDKK, penyaluran dana (misalnya melalui perbankan) akan mengalami kesulitan. Dengan adanya NIK, program subsidi pupuk langsung dapat diintegrasikan dengan program kartu elektronik lain yang telah berjalan.

Penutup

Dengan penduduk hampir mencapai 250 juta jiwa dan selalu bertambah dari tahun ke tahun, maka kebutuhan pangan pun besar jumlahnya. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, baik untuk papan maupun industri tidak dapat dihindari. Usaha tani di sektor pertanian dengan risiko yang cukup tinggi, rendahnya pendapatan di sektor pertanian, upah buruh tani yang rendah, dan kesulitan dalam pengadaan sarana produksi adalah beberapa tantangan untuk meningkatkan produksi beras nasional.

Diperlukan sinkronisasi kebijakan program pengentasan kemiskinan dengan program peningkatan pangan nasional. Petani sebagai garda terdepan produksi pangan nasional sebagian besar belum mampu keluar dari garis kemiskinan. Hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013 memberikan gambaran di mana sejumlah 14,25 juta rumah tangga petani (55,3 persen) merupakan petani gurem dengan luas lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. Pertanian yang merupakan sektor primer harus kokoh untuk menopang

sektor berikutnya. Namun, yang terjadi pertumbuhan sektor pertanian selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor pertanian pun menurun secara linier.

Dari sektor tenaga kerja, sektor pertanian didominasi oleh tenaga kerja usia lanjut. Angkatan kerja muda lebih memilih sektor non-pertanian yang menjanjikan gaji tetap dan lebih tinggi. Hasil ST 2013 juga menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga (RT) usaha tani pertanian mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2003, jumlah rumah tangga yang bergerak di usaha pertanian sebesar 31,2 juta RT. Pada tahun 2013, jumlah RT yang bergerak di usaha tani pertanian hanya sebesar 26,1 juta RT atau mengalami penurunan sebesar 5,1 juta (turun 16 persen) selama sepuluh tahun. Hasil sensus ini memberikan lampu kuning untuk perkembangan pertanian ke depan, khususnya produksi beras nasional yang mempunyai implikasi sangat tinggi pada ketahanan pangan.

Perlu reorientasi kebijakan antarsektor agar sektor pertanian kembali bangkit. Peningkatan produksi pangan merupakan permasalahan multidimensi. Kebijakan perlu diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur pertanian, keterjangkauan harga sarana produksi seperti pupuk, benih dan obata-obatan, serta kebijakan peruntukan lahan pertanian. Untuk itu, perlu dukungan berbagai pihak, termasuk dukungan politik untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia di masa datang.

NANTIKAN SEPTEMBER 2016 RAPAT KERJA NASIONAL AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2016

Tantangan dan Strategi
Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif :
Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
dan Pengentasan Kemiskinan

*) Peneliti pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal. Artikel ini merupakan pendapat pribadi, dan tidak mewakili institusi di mana penulis bertugas.



Cinta Ataka pada Dunia Robotika

Tak salah jika Ahmad Ataka Awwalur Rizqi terpilih menjadi salah satu penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Usianya baru 24 tahun, tapi Ataka—biasa dia disapa—sudah menorehkan berbagai prestasi yang menginspirasi. Mahasiswa program doctoral di King’s College London, Inggris itu menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terlibat dalam sebuah proyek robot untuk bedah medis di Eropa.

Proyek robot yang diikuti Ataka termasuk dalam program European Commission dengan keterlibatan berbagai universitas dan lembaga riset dari seluruh Eropa. Pada Januari 2015, ada dua proyek besar di sana. Yang pertama adalah *STIFF-FLOP*, sebuah proyek dengan tujuan mendesain sistem robotika baru untuk keperluan bedah di bidang medis, sedangkan yang kedua adalah *Four by Three* yang mengembangkan robot manipulator untuk digunakan di lingkungan industri.

Ketertarikan Ataka pada robotika bermula sejak menempuh kuliah di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gajah Mada (UGM) pada 2010. Di sana, putra pertama pasangan almarhum Ahmad Taufiqurrahman dan Nur Hilawah itu banyak mengikuti kelompok studi dan kompetisi robotika. “Ilmu yang dipelajari di bidang robotika itu benar-benar bisa langsung terlihat aplikasinya di dunia nyata,” kata Ataka mengungkapkan alasannya jatuh cinta pada bidang robotika.

Langsung S3

Setelah lulus dari UGM pada 2014, Ataka langsung menempuh program Doctor of Philosophy in Robotics di King’s College London. Awalnya, dia berniat untuk mendaftar program master terlebih dahulu. Namun, kesempatan untuk lompat jenjang ternyata datang tak diduga.

Pada pertengahan 2014, karya tulis pengembangan dari skripsinya terpilih menjadi Best Conference Paper Award di konferensi Advanced Robotics and Intelligent Systems (ARIS) 2014 yang berlangsung di Taiwan. Dengan alasan keterbatasan dana, hanya sang dosen pembimbing yang berangkat untuk mempresentasikan karya tulis tersebut. Di Taiwan, dosen pembimbing Ataka bertemu dengan Kepala Centre for Robotics

 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI



Ahmad Ataka merupakan satu-satunya mahasiswa Indonesia yang terlibat dalam sebuah proyek robot untuk bedah medis di King’s College, London.

Foto
Dok. Pribadi

Research (CoRe) King’s College London, Kaspar Althoefer. Dari situlah kesempatan emas untuk langsung kuliah S3 menghampiri Ataka. Kaspar Althoefer menawari Ataka untuk melanjutkan kuliah di London. Beberapa program doctoral di Inggris memang tidak mengharuskan calon mahasiswanya mempunyai gelar master. Setelah melalui rangkaian proses pendaftaran, Ataka pun akhirnya dapat diterima di program doctoral.

Menurut pemuda kelahiran Banyuwangi 24 Juli 1992 itu, banyak tantangan yang dihadapi pada masa awal perkuliahan. Dari sisi akademik, Ataka dituntut untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan belajar yang cukup berbeda dengan di Indonesia. Dalam program yang dia ambil, kegiatan riset menjadi sentral pembelajaran. Program tersebut juga tidak menyelenggarakan kelas ataupun ujian. “Jadi yang ada hanya riset dan laporan saja. Peran pembimbing pun hanya sebatas pendamping karena di sini saya dituntut untuk bisa melakukan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir secara mandiri,” kata dia.

Sementara dari sisi non-akademik, Ataka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki budaya sangat berbeda. “*Alhamdulillah*, selama ini saya banyak terbantu karena aktif di berbagai kegiatan warga Indonesia, khususnya di acara pengajian rutin atau acara lain yang diselenggarakan kedutaan,” ujarnya. Peraih medali perak pada International Physics Olympiad di Kroasia tahun 2010 itu melihat di masa depan, automasi dan robotika semestinya menjadi bidang yang harus dikuasai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat mengambil program robotika. “Bidang ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti membantu meningkatkan produktivitas petani atau petambak udang, membantu tim SAR dalam proses penanggulangan bencana,

hingga membantu dokter dalam proses operasi,” ujar Ataka.

Beasiswa Presiden

Ataka berkuliah di King’s College London dengan skema BPRI. Ketertarikan Ataka mendaftar seleksi BPRI bermula ketika dia mendengar testimoni positif dari sejumlah senior yang sebelumnya telah menjadi *awardee* LPDP. Pengalaman positif mereka, terutama dalam hal kelengkapan fasilitas dan ketepatan waktu pencairan beasiswa, membuat peraih medali perunggu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2014 itu memutuskan untuk mendaftar beasiswa LPDP. “Kebetulan juga, saat itu LPDP membuka program BPRI khusus untuk 50 universitas terbaik dunia. Akhirnya saya pun mendaftar program beasiswa tersebut,” katanya.

Menurut Ataka, proses yang dilalui hingga ditetapkan sebagai penerima beasiswa BPRI cukup panjang dan berliku. Tidak cukup hanya seleksi berkas dan wawancara, para calon penerima beasiswa juga harus melalui satu tahapan seleksi lagi yang disebut Seleksi Tahap Akhir. “Saya dan teman-teman diharuskan menginap selama lima hari di Bogor untuk melalui seleksi kesehatan, psikotes, hingga *leadership project*,” ujar Ataka mengenang pengalamannya.

BPRI adalah beasiswa khusus untuk generasi emas seperti Ataka. Sejak kecil, Ataka memang sudah banyak meraih prestasi. Ketika duduk di bangku SMP, dia telah menulis beberapa karya fiksi. Saat usianya masih 13 tahun, Ataka sudah menulis dua buku, yaitu *Misteri Pedang Skinheald 1: Sang Pembuka Segel* dan *Misteri Pembunuhan Penggemar Harry Potter*. Pada 2007, buku ketiganya yang berjudul *Misteri Pedang Skinheald 2: Awal Petualangan Besar* berhasil diterbitkan.

Bersama dengan seorang kawan karibnya, Ario Muhammad, Ataka baru saja menerbitkan buku *Inspirasi dari Tanah Eropa*. Buku keempat begitu membekas

di benak Ataka. Buku ini adalah karya pertama Ataka yang terbit tanpa bantuan almarhum ayahnya. Selama ini, ayah Ataka selalu hadir menemani proses kreatif, mulai dari penulisan sampai diskusi dengan penerbit. “Beliau dulu pernah merelakan sebagian besar penghasilannya untuk membelikan saya komputer pertama,” katanya. Ataka kecil yang gemar menulis di kertas-kertas kusam dengan tulisan cakar ayam pun bertransformasi menjadi penulis buku yang produktif di belia usia. “Beliau menyadarkan saya bahwa menulis bisa menjadi media berbagi dan berkontribusi, sebuah ladang amal yang teramat mulia,” ujar Ataka lagi. Buku *Inspirasi dari Tanah Eropa* pun secara khusus dia persembahkan untuk sang bapak.

Kontribusi

Di luar aktivitas perkuliahan, Ataka mengajar secara paruh waktu bagi anak-anak warga Indonesia di London. Mata pelajaran yang diajarkannya adalah Matematika dan Fisika. Sesekali dia juga menjadi pemandu bagi tamu-tamu asal Indonesia. “Untuk organisasi, saya sempat aktif di KIBAR (Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya) serta komunitas Nahdlatul Ulama di sini. Selain itu, saya juga masih menekuni hobi menulis buku,” kata dia.

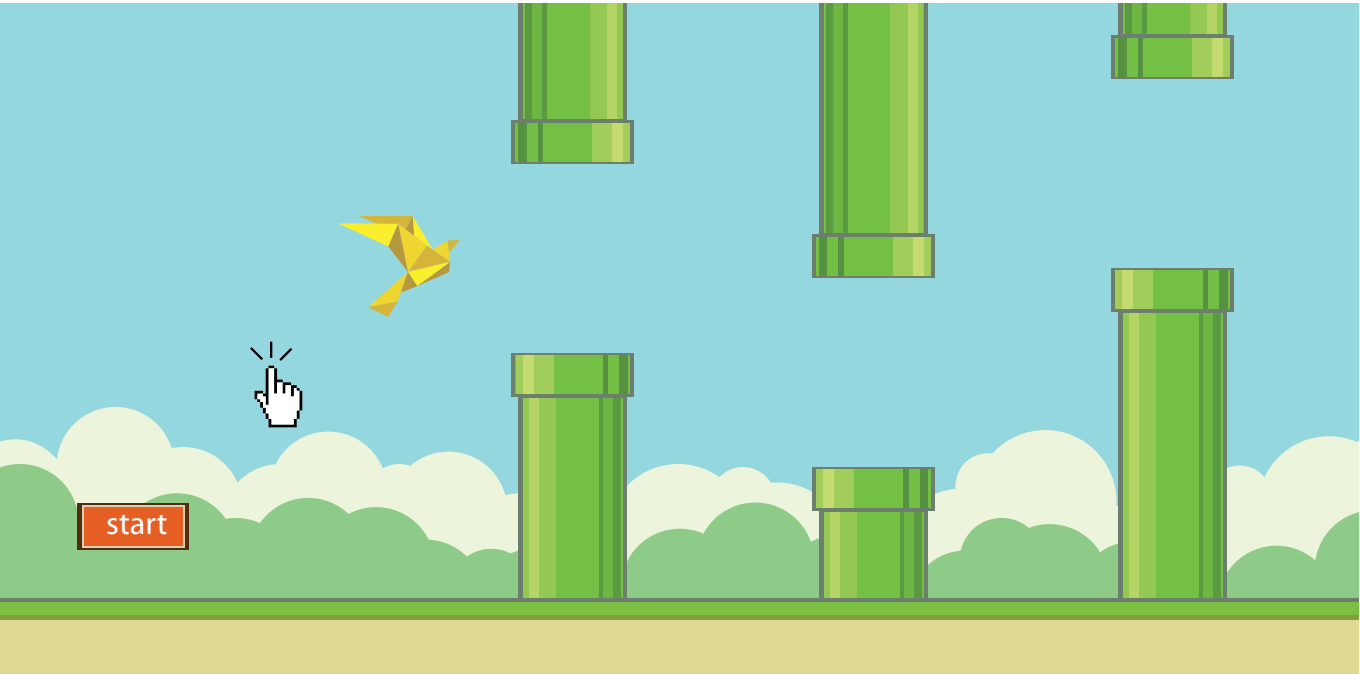
Setelah menyelesaikan S3 nanti, Ataka berkeinginan untuk melanjutkan ke program *post doctoral*. Rencana Ataka berikutnya adalah pulang ke tanah air dan mendaftar menjadi staf pengajar di kampusnya dulu, UGM. Di luar rencana akademik, Ataka juga ingin melanjutkan usaha di bidang aplikasi teknologi robotika yang dulu sempat dirintis bersama beberapa teman. “Saya berharap nantinya bisa berkontribusi melalui bidang keilmuan sebagai pendidik dan teknolog Indonesia,” katanya. Ataka memiliki impian agar di masa depan, Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdaulat secara teknologi, khususnya di bidang robotika.

Teks Dwinanda Ardhi

Mitigasi Risiko Amnesti Pajak

Teks Herry Setyawan, Pegawai Komite Pengawas Perpajakan

Ilustrasi
Arfindo Briyan



Rencana pendapatan negara dalam APBN-P 2016 adalah sebesar Rp1.786,2 triliun. Sampai akhir Juni 2016, realisasi pendapatan sebesar Rp643,03 triliun atau 35,99 persen dari rencana. Sementara itu, realisasi belanja sampai akhir Juni 2016 mencapai Rp874,82 triliun. Artinya, telah terjadi defisit anggaran sebesar 231,79 triliun atau 26,49 persen.

Seretnya realisasi pendapatan negara terjadi karena realisasi penerimaan pajak sebagai komponen pendapatan utama negara jauh panggang dari api. Dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.347,78 triliun, realisasi sampai akhir Juni 2016 baru sebesar Rp458,20 triliun atau 33,8 persen.

Potensi defisit anggaran masih

cukup tinggi mengingat perkembangan perekonomian global yang belum pulih benar. Beberapa lembaga memproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hanya akan mencapai kurang dari 92 persen dari target. Artinya terdapat kekurangan sekitar Rp107,85 triliun.

Salah satu upaya pragmatis yang dilakukan untuk menutup defisit anggaran adalah dengan melaksanakan amnesti pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dari uang tebusan dalam pelaksanaan amnesti pajak tersebut, pemerintah menargetkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun.

Sebenarnya, Indonesia pernah menerapkan kebijakan serupa yaitu

kebijakan pengampunan pajak tahun 1964 dan 1994, kebijakan *sunset policy* tahun 2008, dan kebijakan penghapusan sanksi administrasi (*reinventing policy*) tahun 2015. Implementasi semua kebijakan tersebut dinilai kurang sukses karena tidak mendapat sambutan yang baik dari Wajib Pajak (WP). Di sisi lain, belum ada perbaikan yang berarti dari sistem administrasi perpajakan.

Kebijakan *sunset policy* tahun 2008 hanya berhasil menambah 5.653.128 Wajib Pajak baru, menambah 804.814 pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta menambah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Sementara itu, hasil pelaksanaan *reinventing policy* di tahun 2015 hanya menghasilkan penerimaan sekitar Rp4 triliun.

Amnesti pajak yang efektif berjalan mulai 18 Juli 2016 tentu perlu kita dukung. Meski begitu, pemerintah juga perlu memperhatikan mitigasi risiko terhadap potensi *moral hazard* dalam pelaksanaannya.

Mitigasi Risiko terhadap upaya uji materiil (judicial review)

Berapa elemen masyarakat telah resmi mendaftarkan uji materiil terhadap UU Pengampunan Pajak. Terdapat 11 pasal yang diajukan untuk diuji yang keseluruhannya bertumpu kepada Pasal 1 ayat 1. Pasal tersebut menerangkan bahwa pengampunan pajak diberikan tanpa ada sanksi administrasi dan pidana.

Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 23A

dan Pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan penerimaan pajak bersifat memaksa dan setiap warga negara berhak dapat perlindungan hukum yang sama. Selain itu, ada 21 alasan yang disebutkan, antara lain terkait ketidaksetaraan di hadapan hukum. UU Pengampunan Pajak dianggap berpotensi merusak sistem perpajakan yang telah dibangun sejak tahun 1984.

Upaya uji materiil ini tidak boleh dipandang remeh sebab erat kaitannya dengan kepastian hukum. Pemerintah telah merespon dengan rencana pembentukan satuan tugas khusus yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Tim ini bertugas untuk merumuskan strategi dan *counter argument* terhadap materi gugatan.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak akan kepastian hukum, pemerintah juga perlu menyiapkan rencana cadangan apabila upaya uji materiil terhadap UU Pengampunan Pajak dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Perlu dilakukan kajian untuk menetapkan payung hukum baru bagi pelaksanaan amnesti pajak berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU).

Mitigasi Risiko Terhadap Penyalahgunaan Amesti Pajak

UU Pengampunan Pajak mempunyai celah yang dapat dimanfaatkan oleh WP dan aparat pajak. WP dapat merekayasa laporan keuangannya dengan cara mengecilkan nilai harta bersih dan memperbesar nilai utang (harta bersih=total harta-utang). Hal itu dilakukan untuk memperkecil nilai uang tebusan yang harus dibayarkan. Apabila laporan keuangan WP tersebut

tidak diteliti secara menyeluruh, maka akan terdapat potensi kerugian dari uang tebusan.

Celah lainnya, aparat pelaksana amnesti pajak dapat bekerja sama dengan WP untuk mengambil keuntungan. Misalnya, terhadap WP yang sedang menjalani pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, apabila bersedia mengikuti amnesti, upaya penegakan hukum yang sedang berjalan dapat dihentikan. Jika penghentian tersebut dilakukan tanpa pengawasan intensif, akan berpotensi disalahgunakan dengan tidak mengikuti WP tersebut dalam amnesti pajak. Artinya potensi penerimaan negara dapat berkurang.

Mengingat persiapan pelaksanaan amnesti pajak sangat singkat, upaya mitigasi risiko oleh tim pengawasan aparat pelaksana amnesti pajak belumlah cukup. Hal mendesak yang perlu segera dilakukan adalah menyiapkan aturan pelaksanaan Undang Undang berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen dan Surat Edaran yang mudah dipahami dan diterapkan. Di samping itu, aparat pelaksana amnesti pajak harus disiapkan dari segala sisi. Mulai dari integritas, kompetensi, hingga perangkat sistem administrasi sehingga monitoring dan evaluasi amnesti pajak dapat berjalan sesuai jalur.

Dalam jangka pendek, amnesti pajak bertujuan menambah penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang akan menciptakan perbaikan struktural perpajakan. Pada akhirnya, perbaikan layanan, sistem administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Ragam Investasi untuk Menampung Dana Repatriasi



Riviu Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen-Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Pasca ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, kebijakan amnesti pajak menjadi perhatian masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat di sejumlah kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara itu, Presiden juga menaruh perhatian besar dengan membuka sejumlah sosialisasi di beberapa kota, bahkan menyediakan *contact center* tersendiri untuk pengaduan pengampunan pajak.

Sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016, Kemenkeu menerbitkan PMK Nomor 119/PMK.08/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen-Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak yang diundangkan tanggal 18 Juli 2016 (PMK Nomor 119). Selanjutnya, PMK tersebut diubah dengan PMK Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen-Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak (PMK Nomor 123). Hal ini dilakukan guna meningkatkan tugas dan fungsi *gateway* (pintu masuk) dalam mengalihkan dan mengelola harta terkait pengampunan pajak, serta mengakomodir perpindahan investasi antargateway.

Pengalihan Harta

PMK Nomor 123 mengatur secara rinci prosedur pemindahan harta wajib pajak (WP) yang mengikuti program pengampunan pajak, termasuk jenis dan bentuk investasi yang bisa dipilih WP dalam menempatkan dananya di Indonesia. Pemindahan harta ke Indonesia dilakukan melalui *gateway* yang ditunjuk oleh pemerintah. Mengacu ketentuan pada Pasal 3 PMK Nomor 123 dalam hal harta yang diungkapkan berada di luar negeri, maka yang dapat dipindahkan ke Indonesia

adalah harta berupa dana. Selain itu, pengalihan dana harus dilakukan ke dalam rekening khusus pada bank persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* yang sama.

Tarif tebusan yang dikenakan untuk harta WP yang ditampung di luar negeri akan lebih mahal dibandingkan jika harta tersebut dibawa pulang ke Indonesia. Perlakuan yang sama berlaku pula untuk harta yang ditempatkan dari luar negeri ke Indonesia setelah tanggal 31 Desember 2015, sebelum surat keterangan pengampunan pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya, harta berupa dana tersebut wajib dibuktikan oleh otoritas yang berwenang dan wajib diinvestasikan di Indonesia dalam rangka pengampunan pajak.

Ragam Investasi

Agar harta yang dipindahkan bisa memberikan *multiplier effect* terhadap roda perekonomian Indonesia, pemerintah menetapkan jangka waktu minimal dana tersebut diinvestasikan, yaitu selama tiga tahun. Dana yang masuk dari luar negeri dan berasal dari repatriasi, maupun dari dalam negeri dalam rangka deklarasi, wajib disimpan dalam rekening yang khusus dibuat *gateway* untuk keperluan investasi. Untuk menarik WP berperan serta dalam program pengampunan pajak, pemerintah memberikan beberapa instrumen investasi yang kompetitif dan menguntungkan bagi dana yang masuk ke Indonesia.

Beberapa bentuk instrumen tersebut antara lain Surat Berharga

Negara (SBN), obligasi BUMN maupun lembaga pembiayaan pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, serta obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus untuk produk investasi nonsektor riil, diatur juga berbagai varian efek yang bisa menampung dana repatriasi. Diantaranya, yaitu efek bersifat utang, termasuk *medium term notes*, sukuk, saham, unit penyertaan reksa dana, efek beragun aset, unit penyertaan investasi dana investasi real estate, deposito, tabungan, dan giro. Pemerintah juga mengizinkan efek dalam bentuk instrumen investasi keuangan lainnya, seperti produk asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapat persetujuan OJK.

Gateway

Kemenkeu menunjuk bank, manajemen investasi (MI), dan perusahaan efek sebagai *gateway* dari harta hasil repatriasi guna menampung dana repatriasi pengampunan pajak. MI dan perusahaan efek yang ditunjuk menjadi pengelola dana repatriasi, harus terafiliasi dengan bank persepsi yang memenuhi syarat pemerintah. Sementara itu, untuk repatriasi yang dilakukan melalui bank penampung di luar negeri, maka dalam waktu hari kerja berikutnya harus dipindahkan ke bank penampung di Indonesia.

PMK 123 juga mengatur bahwa bank persepsi yang ditunjuk Kemenkeu sebagai *gateway* harus memiliki kriteria yang

ditentukan. Salah satunya termasuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) 4 dan BUKU 3. Sementara itu, untuk MI yang ditunjuk sebagai *gateway*, persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain dimiliki oleh perusahaan BUMN atau anak perusahaan BUMN serta mengelola dana kelolaan sampai peringkat 10 besar untuk periode pelaporan terakhir. Bagi MI yang dimiliki selain oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, harus mengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dengan *underlying* proyek sektor riil dengan dana kelolaan paling kurang Rp200 miliar, atau mengelola dana investasi *real estat* berbentuk kontrak investasi kolektif.

Penutup

Berbagai pilihan investasi di sektor finansial telah disiapkan pemerintah. Untuk menarik investor, tentunya diperlukan insentif dan kemudahan dari otoritas. Sebagai contoh, investasi di bidang pasar modal, diperlukan insentif berupa penurunan biaya *crossing* saham, biaya *listing*, dan biaya *lender offer*. Sementara untuk industri perbankan, diperlukan imbal hasil yang kompetitif dengan meminimalisasi *cost of fund*. Insentif menjadi sangat penting, sebab dana repatriasi yang disimpan di sektor finansial akan bersaing dengan peluang investasi di sektor riil. Selain itu, pilihan investasi sangat penting untuk mendorong WP mengungkapkan hartanya di tengah realisasi capaian amnesti pajak saat ini jauh dari target.

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Teks Budi Sulistyoy

Kisah Peneliti Pecinta Kopi

Tulisan ilmiahnya mendapat pengakuan di dalam dan luar negeri. Dalam situs Research Gate, bahkan karyanya telah dilihat dan diunduh sebanyak hampir 10.000 kali.



Agung Darono, lahir dan tumbuh besar di Karanganyar, Surakarta. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mengikuti pendaftaran mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Spesialisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Di tengah-tengah masa studinya, Spesialisasi PBB berubah menjadi Spesialisasi Pajak. “Saya masuk jurusan PBB, saat kelulusan predikatnya jadi lulusan jurusan pajak,” ujar Agung, sapaan akrabnya, sembari tertawa.

Berkecimpung di dunia Teknologi Informasi

Begitu lulus kuliah pada tahun 1993, Agung beruntung mendapat penugasan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan. Di unit tersebut, Agung mulai berkenalan dengan sistem teknologi informasi perpajakan. Pria kelahiran 14 Maret 1972 ini menikmati profesinya sebagai *programmer*. Berbekal kecintaannya itu lah, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi fungsional Pranata Komputer pada tahun 1995.

Agung tak pernah membayangkan bahwa teknologi informasi akan mewarnai rutinitas pekerjaannya sehari-sehari. Padahal saat masih sekolah atau kuliah ia bukanlah pecinta komputer. “Saya tertarik mendalami bidang ini karena banyak hal baru yang menantang dan banyak orang yang belum tertarik untuk menekuni,” katanya. Agung membuktikan, melawan arus (*antimainstream*) justru membuka berbagai kesempatan dan pengalaman baru.

Dunia teknologi informasi saat itu masih dianggap sebagai *supporting function*. Seiring dengan berjalannya waktu, Agung turut menyaksikan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin pesat, khususnya dalam teknologi perpajakan. “Hal-hal baru bisa diciptakan dari pemanfaatan teknologi informasi yang bagus,” tegasnya. Agung mengalami proses perubahan teknologi yang semula menjadi *supporting* kini menjadi suatu hal yang strategis.

Penggunaan teknologi juga tampak nyata dalam modernisasi DJP. Agung turut berkontribusi dalam pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di Jakarta, pada kurun waktu 2002-2003. Pada tahun 2002, ia menjadi salah satu perwakilan dari Kantor Pusat DJP untuk diperbantukan di kantor tersebut. Tugasnya adalah mendampingi kinerja kantor baru hingga kantor tersebut menjadi mandiri. “Bukan mutasi, saya sebagai tim *ad hoc* di KPP dan Kantor Wilayah hingga tahun 2003,” kata Agung yang pernah menerbitkan buku Aplikasi MS-Excel: Sebagai Perangkat Bantu Audit yang diterbitkan oleh Elexmedia Komputindo pada tahun 2007.

Kehidupan baru sebagai widyaiswara

Kecintaan Agung untuk mengajar mulai muncul sejak tahun 1998-1999. Saat itu ada seorang rekan yang memberikan

tawaran mengajar di hari sabtu selama dua semester. Pada tahun 2003, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan membuka kesempatan untuk seleksi calon widyaiswara. Saat diterima sebagai widyaiswara, Agung mendapat penugasan di Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang. “Salah satu tugas pokok widyaiswara adalah melakukan penelitian, maka saya mulai melakukan penelitian yang saya publikasikan,” kata pecinta kopi ini.

Sebagai widyaiswara, Agung terbilang produktif melakukan publikasi ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa diantaranya bahkan mendapat penghargaan sebagai *Best Paper*. Beberapa di antaranya yaitu predikat *Best Paper* dalam Seminar Perpajakan Nasional 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, *Best Paper* (3rd) dalam Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi di Universitas Islam Indonesia 2014, dan *Best Paper* (3rd) dalam International Conference on Indonesia Development 2013, The Hague, Belanda.

Di Belanda, Agung mempresentasikan tulisan ilmiahnya yang berjudul *Public Sector Innovation through e-Services: The Case of Indonesian Tax Administration*. Pada tahun 2014, Agung kembali mendapat tawaran mengikuti konferensi standar pengelolaan data nasional di Loughborough University di Inggris. Agung juga pernah mengikuti *International Workshop on Computer Auditing Education* di Vancouver, Kanada dan sekaligus mendapatkan sertifikat sebagai ICCP (*International Certified CAATs Professional*).

Widyaiswara Teladan

“Pak Agung, teman-teman sudah sepakat kalau Bapak yang maju (pemilihan Widyaiswara Teladan 2014),” tutur Kepala BDK Malang, Budi Setiawan, kala itu. Pemberitahuan tersebut cukup

mengejutkan Agung. Proses seleksi pun tidak terlalu lama. Lulusan terbaik Magister Teknik Elektro konsentrasi Chief Information Officer (CIO) Universitas Gajah Mada periode wisuda Januari 2013 ini pun berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi wawancara. Pada 10 Desember 2015, terpilihlah Agung sebagai Widyaiswara Teladan Tahun 2014. Sayang, saat itu Agung berhalangan menghadiri acara penyerahan penghargaan karena mengikuti diklat di Balai Diklat Kepemimpinan di Magelang.

Begitu banyak prestasi yang telah dilakukan Agung lantas tak membuatnya berhenti berkarya. Bagi Agung, pencapaiannya saat ini merupakan bentuk tanggung jawab profesi. “Profesi yang saya jalani itu memiliki tugas selain kegiatan saya mengajar di kelas. Ajarkan yang kamu teliti, teliti yang kamu ajarkan,” tegasnya. Ia menganggap, prestasi *Best Paper* yang diraih merupakan apresiasi dari pekerjaannya, tidak menjadi tujuan utama. Apabila kita melihat situs Research Gate, akan tampak tulisan Agung yang telah dilihat (*viewed*) dan diunduh sebanyak 9.900-an kali. Tentu ini merupakan apresiasi karya yang luar biasa.

Di sela-sela rutinitasnya, Agung mengaku hobi meracik kopi. Bukan sembarang meracik, Agung pernah mengikuti sebuah *roasting class* (kelas memanggang kopi) dan *barista class* yang diadakan sebuah asosiasi kopi di Surabaya. “Saya suka *ngutek-ngutek* (mengotak-atik) alat-alatnya dan biji kopinya. Biji kopinya ada yang dari Toraja, Mandailing, Gayo, dan Jawa,” tuturnya sembari tersenyum. Tak hanya itu, Agung juga gemar memasak. Bahkan ia pernah menciptakan saus barbekyu hasil racikannya sendiri. “Resepnya diminta ibu-ibu kantor, berarti enak ya?” kata ayah dari dua putra ini tergelak.

Foto
Dok. Pribadi

Teks Pradany Hayyu

Memilih untuk Menang

Beberapa banyak kejadian yang awalnya kita anggap sebagai musibah dan penderitaan, tetapi suatu hari kita syukuri sebagai sebuah anugerah. Hal ini pula yang dirasakan oleh Yusra Mardini. Beberapa tahun lalu, Yusra adalah seorang remaja biasa. Namun, kini kita mengenalnya sebagai 1 dari 10 atlet hebat yang bertanding di Olimpiade Rio.

Seperti diberitakan oleh sejumlah media internasional, untuk pertama kalinya dalam sejarah, olimpiade tidak hanya diikuti oleh atlet yang mewakili negara mereka masing-masing. Akan tetapi diikuti juga oleh atlet yang tidak membawa bendera negara manapun, bahkan tidak memiliki catatan sebagai atlet sebelumnya. Tim ini kemudian diberi nama *Refugee Olympic Team* (ROT). Sebagaimana namanya, tim ini terdiri dari para pengungsi. Kekacauan akibat perang di beberapa Negara, memaksa penduduknya untuk mengungsi, termasuk anggota tim ROT ini.

Yusra sebagai salah satu anggota tim, memiliki kisah menarik. Suatu



malam, Yusra dan saudara perempuannya melarikan diri dari negaranya, Syria. Mereka berangkat bersama dengan 18 orang lainnya. Malang, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan mulai tenggelam di tengah perjalanan menuju Yunani. Peristiwa tenggelamnya kapal yang membawa para pengungsi seringkali menjadi akhir dari usaha penyelamatan diri mereka. Yusra hampir mengalami kejadian serupa.

Tidak seorang pun, selain Yusra dan saudara perempuannya yang bisa berenang. Namun, mereka pantang menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki, Yusra dan adik perempuannya nekat melompat ke dalam laut Aegea yang dingin dan mulai berenang, sambil mendorong kapal bermuatan 18 orang penumpang. Mereka terus berenang selama 3 jam, hingga berhasil selamat di daratan Yunani.

Alih-alih menganggapnya sebagai peristiwa mengerikan, Yusra memilih untuk menyimpan peristiwa ini sebagai motivasi hidupnya. “*I remember that without swimming I would never be alive*

maybe because of the story of this boat. It’s a positive memory for me“. Yusra memilih peristiwa mengerikan ini sebagai kenangan positif yang mendorongnya untuk terus bangkit. Menjadikannya sebagai kekuatan, bahkan mampu mengubah tujuan hidupnya.

Kisah ini juga mengajarkan kita untuk mampu menghadirkan optimisme dan cara pikir positif di setiap kondisi yang kita alami. Bahkan pada kondisi yang seolah tanpa jalan keluar. Disertai tekad dan keyakinan yang kuat, Yusra membuktikan mampu menyelamatkan masa depannya beserta masa depan belasan orang lain yang turut bersamanya.

Cara pandang, cara berpikir, dan cara menyikapi keadaan, sudah selayaknya menjadi jalan bagi kita memperoleh kesuksesan di masa depan. Ketiganya harus mampu mendukung perbaikan kualitas hidup kita. Bukan justru menjadi penghalang terbesar bagi diri dan masa depan kita. Akan selalu ada jalan terbuka bagi mereka yang yakin. Ya, sebab kita dilahirkan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang yang mengalah pada keadaan.

Teks Athiah Listyowati



Judul: Trik Juara Mengatur Waktu: Be The CEO of Your Own Time
Pengarang: Zivanna Letisha
Penerbit: Gagas Media
Kota Terbit: Jakarta
Tahun Terbit: 2016
Deskripsi Fisik: 194 halaman
ISBN: 9789797808587

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Perpustakaan Kemenkeu
Perpustakaan Kementerian Keuangan
@kemenkeulib
www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 Hujan Tere Liye
- 2 Supernova: Inteligensi Embun Pagi Dee Lestari
- 3 Komik dari Twitternya Raditya Dika Eka Kurniawan
- 4 Ayat-ayat Cinta 2 Habiburrahman El-Shirazy
- 5 Cantik Itu Luka Eka Kurniawan

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 Bagaimana Perekonomian Tumbuh dan Mengapa Runtuh Peter D. Schiff
- 2 Trik Juara Mengatur Waktu: Be The CEO of Your Own Time Zivanna Letisha
- 3 Boleh Gak Sih Ngarep?: Belajar tentang Sedekah Yusuf Mancur
- 4 Ayah Edy Punya Cerita Ayah Edy
- 5 The Property Tax and Local Autonomy Michael E. Bell, David Brunori, Joan Youngman

Salah satu perbedaan yang mendasar pada setiap diri manusia dalam menentukan keberhasilan hidupnya yaitu, kemampun untuk mengatur waktu. Tidak sedikit teori-teori manajemen waktu yang berujung gagal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kebanyakan dari teori itu mengajarkan kita untuk mengatur *clock time* atau waktu yang tertera pada jam dinding. Padahal, kita tidak hidup di dalam ‘jam dinding’, *we live in a real time!* Kita hidup di luar jam dinding, kita hidup dalam waktu yang nyata, waktu yang sebenarnya. Pergi ke kantor, menghabiskan waktu dengan keluarga, dan membayar tagihan-tagihan kartu kredit adalah hal-hal yang bukan diukur dengan ‘jam dinding’.

Ada pepatah yang mengatakan bahwa *Time is Money* atau waktu adalah uang, sepertinya perlu dikoreksi kembali. Sebab waktu jauh lebih berharga dari hanya sekedar nominal uang. Uang bisa saja dicari, akan tetapi waktu yang telah berlalu tak akan pernah bisa kembali. Kesuksesan seseorang pun tidak dapat diukur berdasarkan seberapa penuh jadwal hariannya di kalender dari pagi hingga malam, tapi diukur pada seberapa besar efek yang diberikan atas tiap-tiap kegiatan yang dilakukan. Sangat mudah untuk menjadi orang yang sibuk, seringkali kita terjebak di dalamnya. Bisa dikatakan sibuk apabila kita melakukan suatu kegiatan terus-menerus dan hal

tersebut menjadi kebiasaaan. Alangkah baiknya bila kesibukan kita diiringin dengan produktivitas. Jadilah orang yang produktif, dibandingkan menenggelamkan diri dengan kesibukan.

Buku ini banyak memberikan tips pembagian waktu untuk diri sendiri dalam sehari, mengetahui permasalahan tiap orang mengenai waktu, mengetahui *clock time* dan *real time*, mengetahui kekuatan terbesar dari waktu yang kita punya yaitu waktu pada saat ini dan bagaimana kita bisa menjadi CEO (Chief Executive Officer) atau bos untuk waktu kita sendiri. Kita juga bisa mengetahui trik untuk dapat memenangkan waktu di hari kerja (*Win Your Weekdays*) dan di hari libur (*Win Your Weekends*), membentuk kebiasaan layaknya para juara, sampai formula-formula rahasia yang bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit saja untuk tetap produktif tapi sungguh mengasyikkan.

Adanya sudut yang berisi pengalaman penulis di setiap *chapter* membuat khas nuansa *story telling ala* Zivanna Letisha. Dibarengi contoh kasus dan bagaimana penyelesaiannya, maka pembaca dapat melakukan simulasi langsung dari pembahasan yang disampaikan tiap temanya. Puteri Indonesia 2008 dan kandidat Miss Universe 2009 versi *online votes* ini nampaknya ingin membuat buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan. Dominasi biru pada sampul buku dan huruf di dalam seluruh tulisan, serta visualisasi setiap ceritanya menjadikan buku ini simpel dan mudah dicerna.

Peresensi Krishna Pandu Pradana



Tetirah ke Danau Linow

Sulawesi Utara memiliki bentang alam yang menawan. Salah satu destinasi menarik yang dapat kita singgahi adalah Kota Tomohon.

Kota yang berada di kaki Gunung Lokon ini dapat dicapai setelah satu jam berkendara dari Manado, ibu kota provinsi. Kota Bunga, demikian Tomohon biasa disebut.

Saya tak bosan menatap panorama yang berada di kanan dan kiri jendela bus. Nun jauh di belakang perkampungan, tampak Gunung Lokon samar tertutup awan. Di sepanjang jalan yang saya lewati, berdiri rumah-rumah panggung dari kayu. Di antara rumah-rumah itu, terdapat petak-petak kebun yang dijejali bermacam bunga aneka warna.

Jika Amerika Serikat punya festival bunga mawar di Pasadena, Indonesia patut berbangga dengan Festival Bunga Internasional di Tomohon. Dalam festival yang digelar sejak 2008 ini pengunjung dapat menikmati atraksi karnaval kendaraan yang dihias dengan bunga hasil budidaya para petani lokal. Kombinasi tanah yang subur dan hawa yang sejuk membuat beragam varietas bunga tumbuh subur di sini.

Bus yang saya tumpangi menikung tajam lalu menanjak mengikuti kontur jalanan. Tibalah saya di Danau Linow.

Deretan pohon pinus di tepi danau tertutup kabut yang melayang rendah, membuat danau ini tampak begitu mistis. Air danau berwarna hijau toska akibat kandungan mineral yang tinggi. Di lain waktu, air danau bisa berwarna biru atau kuning kecoklatan. Kata Linow sendiri berasal dari bahasa Minahasa 'lilinowan' yang berarti tempat berkumpulnya air.

Tak jauh dari danau tampak asap putih keluar dari tanah yang disebut 'fumarol'. Lubang tersebut mengeluarkan uap air dan gas bumi secara alami. Tomohon diberkahi alam yang tak hanya indah, tetapi juga kaya sumber daya alam. Fumarol yang ada di sekitar Danau Linow merupakan penanda bahwa daerah ini memiliki potensi energi panas bumi. Selain fumarol, energi panas bumi ini muncul ke permukaan dalam bentuk mata air panas dan kolam lumpur.

Danau ini menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna endemik. Hutan pinus yang mengelilingi danau menjadi rumah yang nyaman bagi aneka burung seperti burung madu sriganti, burung kentul perak, dan burung pecuk ular asia. Saat berada di tepian danau, saya menjumpai kawanan itik liar yang sedang berburu ikan.

Di tepi danau terdapat sebuah rumah makan berkonsep minimalis.

Menjelang siang, saya memutuskan rehat sembari mengisi perut di tempat ini.

Pilihan hidangan cukup beragam. Mulai dari minuman tradisional, jajanan lokal, hingga makanan utama. Saya memesan secangkir kopi Minahasa dan sepiring pisang goroho, kudapan dengan cita rasa gurih asin.

Pisang goroho terbuat dari pisang yang digoreng tanpa tepung, biasanya dilengkapi sambal ikan roa. Untuk hidangan utama, saya memesan ikan bakar khas Manado. Ikan ini dibakar dengan bumbu minimalis sehingga tidak menghilangkan rasa asli daging ikan yang manis dan gurih. Sambal dabu-dabu dan tumis kangkung yang menjadi hidangan pendamping membuat santapan terasa lebih sedap. Saya memilih tempat di sudut balkon agar dapat menikmati sajian sehingga bisa leluasa melihat pemandangan danau.

Sebagian besar pengunjung Danau Linow datang bersama keluarga atau kolega. Menurut mereka, pemandangan Danau Linow dan udaranya yang sejuk, menjadi pemulih letih. Saya pun merasakan hal serupa. Setelah singgah di Danau Linow dan mengabadikan keindahannya melalui lensa kamera, saya kembali ke ibukota dengan semangat yang terisi kembali.

Teks dan Foto Adhi Kurniawan, Pegawai DJPK

Berawal dari sekedar 'coba-coba', Gilang Bhaskara kini justru menikmati dunia komedi tunggal atau lebih dikenal dengan istilah *stand up comedy*. Tak ada yang menyangka pria berpostur tinggi, berambut keriting, dan berkacamata ini sudah berkeliling ke sejumlah negara untuk membawakan guyonan khas Indonesia.



Tidak Usah Takut

Keseriusan pria kelahiran Jakarta, 10 Februari 1989 ini dalam lawakan tunggal terbukti saat berhasil meraih gelar *runner up* pada kompetisi Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) season 2 tahun 2012. Setelah ajang tersebut berakhir, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Parahiyangan Bandung ini kerap tampil di berbagai tempat. Salah satu pencapaiannya saat ia diajak oleh Pandji Pragiwaksono seorang presenter sekaligus komedian untuk ikut tampil ke Brisbane, London, dan Guangzhou dalam Mesakke Bangsaku World Tour 2014.

Pria yang kerap disapa Gilbhas ini menyatakan bahwa mulanya ia tak pernah berpikir untuk mencoba *stand up comedy*. "Pertama kali coba tahun 2015, kebetulan bisa lucu, ternyata ada bakat disitu. Kalau tidak pernah coba, kita tidak akan pernah tau bakat kita dimana. Jadi, coba aja dulu," ungkapnya saat ditemui

Media Keuangan pada Capacity Building Biro Komunikasi dan Layanan Informasi tahun 2016 di Bogor, beberapa waktu lalu.

Gilbhas memberikan saran bagi pegawai Kementerian Keuangan yang tertarik di dunia *stand up comedy*. Ia meminta agar tidak mengambil materi *jokes* (lawakan) dari internet, materi dari orang lain, ataupun materi dari pesan singkat yang pernah ada. "Nomor satu original itu wajib. Yang penting jujur."

Di mata Gilbhas, seseorang tidak harus menceritakan pengalaman sendiri. "Bukan jujur kita harus alami sendiri tapi *concern* kita. Kadang-kadang keliatan kalau dipaksain, misalnya membawakan (materi) politik biar keliatan keren padahal mungkin hatinya gak suka *ngomongin*. Cari sesuatu yang personal, misalnya tentang diri sendiri, kerjaan, keluarga. Observasi lebih banyak dan jujur intinya," katanya.

Selain itu, Gilbhas juga menegaskan pentingnya penonton yang terbuka pola pikirnya. "Sedikit atau banyak pasti ada yang suka, ada yang tersinggung. Tidak usah takut, asal berani bertanggung jawab atas apa yang kita omongin sebenarnya tenang saja," tegasnya.

Teks lin Kurniati

Foto
Dok. Biro KLI



Bung Piskal

CERITA: ARFINDO GAMBAR: BIMO

Niat lembur,
malah mati
lampu...

Aduuh...
Sampai jam
berapa ini mati
lampunya?

Kal...
Piskal...

Hah?!

Kerjaan udah selesai, Kal?
Ayo pulang!

Eh, udah nggak
mati lampu ya?

Mati lampu
apaan?
Jadi lo dari
tadi tidur?



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SUKUK NEGARA
TABUNGAN
Investasi Membangun Negeri



Sukuk Negara Tabungan Seri ST-001 Tahun 2016

Instrumen Investasi Berbasis Syariah
Yang Aman dan Menguntungkan
“Bersama Sukuk Tabungan, Investasi Membangun
Negeri Untuk Generasi Penerus Bangsa”

Masa Penawaran: 22 Agustus 2016 s.d. 2 September 2016
Penerbitan: 7 September 2016 | Imbalan: 6,9% per tahun
Pembayaran Imbalan: tanggal 7 setiap bulan | Jatuh Tempo: 7 September 2018
Minimum Pemesanan: Rp2.000.000 | Maksimum Pemesanan: Rp5.000.000.000
Ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (syarat dan ketentuan berlaku)

Pembelian Sukuk Negara Tabungan Seri ST-001 Tahun 2016 dapat dilakukan di 26 Agen Penjual di bawah ini:

